

**KEPERCAYAAN (*TRUST*) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA KELOMPOK AL-IKHLAS  
DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN  
BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL)**

**TUGAS AKHIR SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan



Oleh :  
Friska Zana Mustika  
NIM 12102244025

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
JURUSAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH  
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
2017**

## PERSETUJUAN

Tugas Akhir Skripsi dengan Judul

**KEPERCAYAAN (*TRUST*) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA KELOMPOK AL-IKHLAS DI UNIT  
PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN  
TEGAL)**

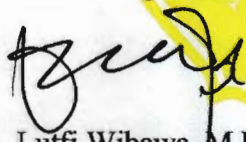
Disusun oleh:

Friska Zana Mustika  
NIM 12102244025

telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk  
dilaksanakan Ujian Tugas Akhir Skripsi bagi yang bersangkutan.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Mengetahui,  
Ketua Program Studi



Lutfi Wibawa, M.Pd.  
NIP 19780821/200801 1 006

Diketahui,  
Dosen Pembimbing



Dr. Entoh Tohani, M.Pd.  
NIP 19800512 200501 1 001

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Friska Zana Mustika  
NIM : 12102244025  
Program Studi : Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan  
Judul : Kepercayaan (*Trust*) dalam Program Pemberdayaan  
Perempuan (Studi Kasus pada Kelompok Al-Ikhlas  
di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan  
Bumijawa Kabupaten Tegal)

menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat kata atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Yang menyatakan,



Friska Zana Mustika  
NIM 12102244025



## HALAMAN PENGESAHAN

Tugas Akhir Skripsi

### KEPERCAYAAN (*TRUST*) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA KELOMPOK AL-IKHLAS DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL)

Disusun oleh:

Friska Zana Mustika  
NIM 12102244025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tugas Akhir Skripsi  
Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan  
Universitas Negeri Yogyakarta  
Pada tanggal 19 Juli 2017

TIM PENGUJI

Nama/Jabatan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Dr. Entoh Tohani, M.Pd.	Ketua Penguji		8 - 8 - 2017
Trisanti, M.Pd.	Sekretaris Penguji		7 - 8 - 2017
Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si.	Penguji Utama		2 - 8 - 2017

Yogyakarta, 14 AUG 2017  
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta  
Dekan,



Dr. Haryanto, M.Pd.

NIP. 19600902 198702 1 001

## MOTTO

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada *Rabb*-mulah engkau berharap.

(QS. Al-Insyirah: 5-8)

Sesuatu yang belum dikerjakan seringkali tampak mustahil, kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.

(Evelyn Underhill)

## **PERSEMBAHAN**

Atas karunia Allah SWT

Karya ini akan saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan doa untuk keberhasilan penulis dalam menyusun karya ini.
2. Almamaterku, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang begitu besar.

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Kepercayaan (*Trust*) dalam Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus pada Kelompok Al-Ikhlas di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal).” Penulis menyadari bahwa karya ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan saran dari berbagai pihak. Berkenaan dengan hal tersebut, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas dan kemudahan sehingga studi saya berjalan lancar.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yang telah memberikan fasilitas dan sarana sehingga studi saya berjalan dengan lancar.
3. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah yang telah memberikan kelancaran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Entoh Tohani, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan mengarahkan dan membimbing penulis dalam mengerjakan Tugas Akhir Skripsi.
5. Ibu Dra. Widyaningsih, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi dalam proses belajar dan penyusunan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.

7. Ibu Dra. Fasikhatun selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang telah memberikan izin dan bantuan untuk penelitian.
8. Bapak/ Ibu Pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijaawa Kabupaten Tegal serta masyarakat setempat yang telah berkenan membantu dalam penelitian.
9. Bapak, Ibu, Kakakku Fani, dan Adikku Akmal yang selalu memberikan doa, perhatian, kasih sayang dan segala dukungannya.
10. Teman-temanku Jida, Ami, Dita, Dwi, Anggrita, Irfa, Resta, dan Retno atas doa, bantuan dan motivasi untuk selalu berjuang dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman PLS B 2012 yang selalu memberikan dukungan dan motivasi perjuangan meraih kesuksesan.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu, yang telah membantu dan mendukung penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga seluruh dukungan yang diberikan dapat menjadi amal dan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak terutama pemerhati Pendidikan Luar Sekolah dan pendidikan masyarakat serta pembaca umumnya. Aamiin.

Yogyakarta, 21 Juni 2017

Penulis



**KEPERCAYAAN (*TRUST*) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA KELOMPOK AL-IKHLAS  
DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN  
BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL)**

Oleh:  
Friska Zana Mustika  
NIM 12102244025

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) kebermanfaatan kepercayaan dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa (2) faktor pendukung dalam membangun kepercayaan pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa (3) faktor penghambat dalam membangun kepercayaan pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Subyek penelitian ini adalah pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dan anggota Kelompok Al-Ikhlas. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, dokumentasi, dan wawancara. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah reduksi data, *display* data, dan penarikan kesimpulan. Teknik yang digunakan untuk keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) kepercayaan pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dapat dikatakan terjalin dengan baik. Kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai manfaat sebagai berikut: terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan, menumbuhkan komitmen, menentukan lamanya hubungan kerjasama yang terjalin, dan meningkatkan kualitas program, (2) faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*): (a) faktor internal dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pengurus kelompok, dan anggota kelompok, (b) faktor eksternal dari desa dan pihak bank, (3) faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) berasal dari faktor internal yaitu masih ada anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman yang disebabkan pendapatan yang tidak tentu dan rendahnya pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta kurangnya pemahaman tentang administrasi. Oleh karena itu, kepercayaan sebagai salah satu penentu keberhasilan program perlu dimanfaatkan dan dipertahankan guna membangun hubungan kerjasama yang nyaman dan saling menguntungkan.

Kata Kunci: *Kepercayaan (trust), Program SPP, UPK*

# **TRUST IN WOMEN EMPOWERMENT PROGRAM (CASE STUDY OF AL-IKHLAS GROUP IN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) BUMIJAWA TEGAL)**

*By:*  
*Friska Zana Mustika*  
NIM 12102244025

## **ABSTRACT**

This study aims to describe: (1) the utility of trust in women empowerment program in Unit Pengelola Kegiatan (UPK) of Bumijawa (2) supporting factors in building trust in women's empowerment program in Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa (3) inhibiting factors in building trust in women's empowerment program in Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa.

This research used qualitative approach with case study research method. Subject of this research are the manager of Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa and member of Al-Ikhlas Group. Data collection was done by using observation method, documentation, and interview. Data was analyzed by data reduction, data display, and conclusion. The technique used for data validity in this research is source triangulation.

The results of this research are: (1) the trust in Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program in Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa has been well established. The benefits of trust in Simpan Pinjam Perempuan (SPP) program are: mutual cooperation, make a commitment, determine the relationship duration of cooperative, and improve quality program, (2) The supporting factors in building trusts: (a) Internal factors from managers of Unit Pengelola Kegiatan (UPK), group managers, and group members, (b) External factors from village government and banks, (3) The inhibiting factor in trust building comes from internal factors, in there is still a lack of discipline in depositing loans due to uncertain income and low education, resulting in a lack of understanding of lending rules in Unit Pengelola Kegiatan (UPK) and lack of understanding of administration.

*Keyword: Trust, SPP Program, UPK*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian .....	8
F. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Pustaka .....	11
1. Pendidikan Luar Sekolah .....	11
2. Program Pemberdayaan Perempuan .....	18
3. Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	26
4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) .....	41
B. Penelitian yang Relevan .....	43

C. Kerangka Pikir .....	45
D. Pertanyaan Penelitian .....	47
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian .....	49
B. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian .....	51
C. <i>Setting</i> Penelitian .....	52
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Instrumen Penelitian .....	56
F. Teknik Analisis Data .....	58
G. Keabsahan Data .....	60
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Hasil Penelitian .....	62
1. Deskripsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa .....	62
2. Deskripsi Kelompok Al-Ikhlas .....	75
3. Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	79
4. Faktor Pendukung Pembentuk Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	103
5. Faktor Penghambat Pembentuk Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	105
B. Pembahasan .....	108
1. Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	108
2. Faktor Pendukung Pembentuk Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	117
3. Faktor Penghambat Pembentuk Kepercayaan ( <i>Trust</i> ) .....	118
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	121
B. Saran .....	123
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>128</b>

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Kisi-kisi Instrumen .....	57
Tabel 2. Daftar Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) .....	71
Tabel 3. Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa .....	72
Tabel 4. Struktur Kepengurusan Kelompok Al-Ikhlas .....	76
Tabel 5. Daftar Anggota Simpan Pinjam Perempuan Kelompok AL-Ikhlas .....	78
Tabel 6. Pedoman Observasi .....	155
Tabel 7. Hasil Observasi .....	157
Tabel 8. Tabel Analisis Data .....	160

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Kerangka Berpikir .....	47
Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa .....	67
Gambar 3. Bentuk Relasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Al-Ikhlas .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Catatan Lapangan .....	129
Lampiran 2. Pedoman Wawancara .....	143
Lampiran 3. Pedoman Observasi .....	155
Lampiran 4. Pedoman Dokumentasi .....	156
Lampiran 5. Hasil Observasi .....	157
Lampiran 6. Tabel Analisis Data .....	160
Lampiran 7. Dokumentasi Foto .....	182
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan .....	185
Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol .....	186
Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian dari BPMD Jawa Tengah .....	187



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan salah satu problem sosial yang pasti terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut Loekman Soetrisno (1997:16), munculnya kemiskinan dalam suatu masyarakat berkaitan dengan budaya yang hidup dalam suatu masyarakat. Munculnya kemiskinan dikaitkan dengan model pembangunan yang dianut oleh suatu negara. Model pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara akan menimbulkan kemiskinan pada manusia dalam negara yang menganut model tersebut.

Secara umum kondisi sosial ekonomi desa masih memprihatinkan. Persoalan kemiskinan dan kesenjangan masih menjadi masalah krusial di pedesaan. Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di pedesaan masih cukup banyak. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan data kemiskinan Kabupaten Tegal tahun 2014 yang menunjukkan angka 140.300 jiwa (<https://tegalkab.bps.go.id>). Hal ini menunjukkan kemiskinan di Kabupaten Tegal masih menunjukkan angka yang tinggi. Hal ini akan berdampak pada berbagai bidang kehidupan, tingginya angka kemiskinan dapat menyebabkan rendahnya taraf hidup masyarakat, dan timbulnya berbagai permasalahan sosial akibat dari tingginya angka kemiskinan.

Kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan mereka menjadi lebih baik. Perencanaan dan implementasi pembangunan seharusnya berisi usaha untuk memberdayakan mereka sehingga mereka mempunyai akses pada sumber-sumber ekonomi. Dengan demikian, usaha memberdayakan masyarakat desa serta perang melawan kemiskinan dan kesenjangan di daerah pedesaan masih harus menjadi agenda penting dalam kegiatan pembangunan pada masa-masa mendatang.

Berbagai upaya maupun program yang ditujukan sebagai upaya pemberdayaan telah dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah, seperti: Program Takesra – Kukesra, KUBE, PEMP, PNPM dan lain-lain. Namun, pada kenyataannya program-program tersebut masih belum mampu menangani masalah kemiskinan yang ada di Indonesia.

Sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dari pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang terutama berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu program pokok PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di dalam mengimplementasikan kegiatannya dilakukan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK merupakan lembaga yang dibentuk

oleh forum MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai lembaga pengelola dana PNPM Mandiri Pedesaan baik dana hibah ke masyarakat dan dana pinjaman bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat miskin dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai salah satu pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka mengimplementasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh program PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK) pada prinsipnya mendukung program dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan terutama yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ini sebagai upaya memampukan atau memandirikan masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lebih lanjut, Sumodiningrat (Rini Rinawati, jurnal Prosiding SnaPP 2010) menjelaskan bahwa sasaran dan tujuan dari pemberdayaan adalah:

- 1) Meningkatnya peningkatan pendapatan perempuan di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan
- 2) Berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif keluarga
- 3) Berkembangnya kemampuan perempuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparaturnya maupun warga.

Perempuan sebagai salah satu bagian dari masyarakat menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan. Perempuan perlu ikut berpartisipasi dalam pembangunan. Partisipasi perempuan yang dimaksudkan adalah bentuk

kesediaan perempuan secara sukarela dalam menunjang program-program baik atas inisiatif masyarakat lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka baik sifatnya individual maupun kolektif. Pemberdayaan masyarakat dengan dasar pemberdayaan perempuan telah dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dikelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat secara kolektif. Antusiasme kelompok masyarakat seperti ini berpengaruh bagi pengembangan sektor bidang ekonomi berbasis kerakyatan yang lebih maju. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menjadi jalan bagi perempuan untuk ikut berperan serta secara langsung dalam upaya pemberdayaan perempuan. Sebagaimana program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang bertujuan mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan RTM

Keberhasilan suatu program dipengaruhi banyak faktor. Salah satu faktor penting adalah bahwa dalam suatu organisasi harus memiliki kepercayaan (*trust*) yang tinggi. Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Tanpa adanya rasa percaya akan sulit membangun kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka. Dengan adanya rasa saling

percaya, tidak diperlukan kegiatan monitoring terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan yang diinginkan.

Sebagaimana Hasbullah (2006:9), yang menyatakan bahwa berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling percaya dan mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai macam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Selain itu, Fukuyama (2010: xiii) menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota komunitas itu. *Trust* bermanfaat bagi penciptaan tatanan ekonomi unggul karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (*costs*). Dalam bisnis, *trust* bisa mengurangi keinginan menghindari situasi yang tak terduga dan mencegah pertikaian dan sengketa. Dengan *trust*, orang-orang bisa bekerja sama secara lebih efektif. Hal ini dimungkinkan karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Secara umum masyarakat *high-trust* memiliki solidaritas yang sangat tinggi, yang mengakibatkan rakyat mau ikut bekerja sama mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Sementara itu, masyarakat *low-trust*, dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya.

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rajibianto (2010), yang memiliki esensi pokok dalam penelitian yang menekankan pada bagaimana mekanisme yang terbentuk diantara pengrajin

melalui faktor non ekonomis berupa modal sosial dan nilai-nilai agama yang dianut bersama sebagai strategi untuk penguatan usaha. Temuan dalam penelitian ini adalah modal sosial yang diterapkan oleh para pengrajin genteng soka di Desa kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka. Modal sosial menjadikan usaha genteng mereka semakin maju.

Penelitian lain yang mendukung adalah hasil penelitian yang dilakukan oleh Versia Nabela Azizi (2013) yang merumuskan masalah penelitian untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk modal sosial serta pemanfaatan modal sosial yang tumbuh diantara para tukang sampah sebagai strategi kelangsungan hidup. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa modal sosial yang tumbuh diantara tukang sampah di TPS Nologaten adalah modal sosial kepercayaan (*trust*) dalam kerjasama, rasa senasib dan sepenanggungan, saling membantu dan menolong serta jaringan sosial yang diimplementasikan ke sebuah pranata sosial berupa asosiasi Paguyuban Punokawan yang memiliki manfaat terhadap strategi kelangsungan hidup para tukang sampah.

Namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak lembaga yang belum mengetahui bahwa kepercayaan (*trust*) dalam suatu organisasi adalah salah satu hal yang penting dalam kemajuan organisasi sehingga masih banyak lembaga yang belum menerapkan kepercayaan (*trust*) dalam pelaksanaan organisasinya. Begitu pula dengan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Faktor kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting terhadap

keberlangsungan program tersebut. Namun dalam pelaksanaan program tersebut belum diketahui apakah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menerapkan faktor kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui gambaran bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mampu menerapkan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan berupa program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Angka kemiskinan di pedesaan masih tergolong tinggi.
2. Program pemberdayaan yang ada sebelumnya masih belum optimal dalam mengatasi masalah kemiskinan.
3. Banyak lembaga yang belum mengetahui bahwa kepercayaan (*trust*) itu penting dalam kemajuan organisasi.
4. Banyak lembaga yang belum menerapkan kepercayaan (*trust*) dalam pelaksanaannya.
5. Belum diketahui apakah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menerapkan faktor kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas tidak semua dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini hanya dibatasi dan difokuskan pada kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program



pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka dapat diajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?
2. Apa saja faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?
3. Apa saja faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

3. Untuk mendeskripsikan faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

## **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai peranan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan
- b. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terutama bagi jurusan Pendidikan Luar Sekolah sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti
  - 1) Sebagai pengaplikasian ilmu-ilmu yang diperoleh dari bangku perkuliahan dalam bentuk karya nyata.
  - 2) Sebagai penambah pengalaman dan wawasan tentang pendidikan luar sekolah mengenai peranan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan.
- b. Bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)
  - 1) Sebagai bahan pengembangan dan peningkatan program pemberdayaan perempuan

- 2) Memberikan informasi bagi lembaga mengenai kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) guna meningkatkan kebermanfaatan program yang dilaksanakan.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

##### **1. Pendidikan Luar Sekolah**

###### **a. Konsep Dasar Pendidikan Luar Sekolah**

Driyarkara (1980: 32) menyatakan bahwa pendidikan merupakan gejala semesta (fenomena universal) dan berlangsung sepanjang hayat, di manapun manusia berada. Di mana ada kehidupan manusia, di situ pasti ada pendidikan. Sementara itu, Philip H. Coombs (Dwi Siswoyo dkk, 2011: 52) berpendapat bahwa pendidikan dalam arti luas disamakan dengan belajar, tanpa memperhatikan di mana, atau pada usia berapa belajar itu terjadi. Pendidikan sebagai proses sepanjang hayat (*life long process*), dan seseorang dilahirkan hingga akhir hidupnya.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Pendapat lain disampaikan oleh Dwi Siswoyo dkk (2011: 53-54) yang menyatakan bahwa, pendidikan adalah proses dimana masyarakat, melalui lembaga-lembaga pendidikan (sekolah, perguruan tinggi atau

lembaga-lembaga lain), dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan ketrampilan-keterampilan, dan generasi ke generasi.

Sementara itu, Ki Hadjar Dewantara (1977: 20) berpendapat bahwa maksudnya pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan beberapa pendapat oleh para ahli mengenai pendidikan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara sadar dan terencana yang didalamnya terdapat transformasi pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan melalui lembaga di dalam maupun di luar sekolah yang berlangsung sepanjang hayat.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012) menyatakan bahwa jenis pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Menurut UNESCO (Djudju Sudjana, 2004: 15), pendidikan nonformal mempunyai derajat keketatan dan keseragaman yang lebih longgar disbanding dengan tingkat keketatan dan keseragaman pendidikan formal. Pendidikan formal, pada umumnya memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi. Sementara itu, Saleh Marzuki (2012: 93) memaknai pendidikan luar sekolah

sebagai semua kegiatan pendidikan baik sengaja atau tidak, dirancang atau tidak, diorganisasikan atau tidak, yang berlangsung di luar sekolah dan universitas.

Definisi pendidikan luar sekolah dikemukakan oleh Coombs (Mustofa Kamil, 2012: 32) yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan pendidikan yang terorganisir dan sistematis, di luar sistem persekolahan yang mapan, dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya.”

Definisi lain disampaikan oleh Hamijoyo (Mustofa Kamil, 2012: 32) yang menyatakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah:

“Suatu pendidikan yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan melalui proses hubungan sosial membimbing individu kelompok dan masyarakat supaya memiliki sifat dan cita-cita sosial yang positif dan konstruktif guna meningkatkan taraf hidup di bidang material, sosial dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial kecerdasan bangsa dan persahabatan antar manusia.”

Berdasarkan beberapa definisi oleh para ahli mengenai pendidikan luar sekolah di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan di luar sistem persekolahan yang berfungsi untuk memberikan bekal-bekal kehidupan bagi peserta didik guna meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan kesejahteraan sosial.

#### **b. Tujuan Pendidikan Luar Sekolah**

Tujuan pendidikan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh kegiatan pendidikan. Adalah suatu yang logis bahwa pendidikan harus

dimulai dengan tujuan, yang diasumsikan sebagai nilai. Menurut Lavengeld dalam (Dwi siswoyo, dkk, 2011: 26) mengemukakan ada enam macam tujuan pendidikan, yaitu (1) tujuan umum, total atau akhir, (2) tujuan khusus, (3) tujuan lengkap, (4) tujuan sementara, (5) tujuan intermedier, dan (6) tujuan insidental.

Sementara itu tujuan pendidikan luar sekolah, sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 (Mustofa Kamil, 2012: 32-33) adalah:

- a) Melayani warga belajar supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat serta mutu kehidupannya.
- b) Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang diperlakukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
- c) Memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan sekolah

Sementara itu, Hamijoyo (Mustofa Kamil, 2012: 33) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk memecahkan masalah-masalah keterlantaran pendidikan, baik bagi mereka yang belum pernah sekolah maupun yang gagal sekolah (*drop out*), serta memberikan bekal sikap, keterampilan, dan pengetahuan praktis yang relevan dengan kebutuhan kehidupannya.

Berdasarkan pendapat para ahli mengenai tujuan pendidikan luar sekolah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk memecahkan masalah-masalah keterlantaran pendidikan dengan memberikan bekal sikap, keterampilan dan



pengetahuan yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan formal guna memperbaiki taraf kehidupannya.

### **c. Jenis Pendidikan Luar Sekolah**

Pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan di luar sistem persekolahan yang berfungsi untuk memberikan bekal-bekal kehidupan bagi peserta didik guna meningkatkan taraf hidup serta mewujudkan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 14) mengelompokkan pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

#### **1) Pendidikan Kecakapan Hidup**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 46) menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha sendiri.

#### **2) Pendidikan Anak Usia Dini**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 4) menyatakan bahwa pendidikan anak

usia dini adalah, suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

### **3) Pendidikan Kepemudaan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 46) menyatakan bahwa, pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/ kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

### **4) Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 46) menyatakan pendidikan kesetaraan adalah pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/ MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

### **5) Pendidikan Keterampilan dan Pelatihan Kerja**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 46) menyatakan bahwa pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan

peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 47) mendefinisikan:

“Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.”

#### **6) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan**

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (2012: 46) merumuskan pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Lebih jauh, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Kemdikbud.go.id, 2014), mendefinisikan program pendidikan pemberdayaan perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Penelitian ini akan memperdalam pendeskripsian informasi pada jenis pendidikan nonformal pendidikan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, mengenai pendidikan pemberdayaan

perempuan akan dijelaskan lebih jauh pada pembahasan berikutnya.

## **7) Pendidikan Lain-lain**

Segala bentuk pendidikan di luar pendidikan formal yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik yang ditekankan pada pemberian pengetahuan dan keterampilan serta perubahan tingkah laku individu maupun kelompok di masyarakat.

## **2. Program Pemberdayaan Perempuan**

### **a. Pengertian Pemberdayaan Perempuan**

Farida Yusuf Tayibnapi (2000: 9) berpendapat bahwa program adalah sesuatu yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh. Sementara itu menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar (2004: 3):

“Program dapat diartikan sebagai rencana. Apabila program ini langsung dikaitkan dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.”

Sehingga program dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan saksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang.

Kindervatter (Saleh Marzuki, 2012: 89), *empowering will be defined as people gaining an understanding of and control over social, economic and/or political forces in order to improve their standing in*

*society*. Maksud dari definisi di atas adalah bahwa kemajuan dalam kedudukan akan berhasil apabila orang mendapatkan pengendalian yang lebih besar terhadap kekuatan yang berdampak pada kehidupan mereka. Sementara itu menurut Kartasasmita (Isbandi, 2002: 162) mengartikan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Shardlow (Isbandi, 2002: 162), pemberdayaan adalah membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Sejalan dengan definisi para ahli di atas, Kindervatter (Saleh Marzuki, 2012: 221) mengemukakan pemberdayaan sebagai upaya untuk membuat orang memperoleh pemahaman pengendalian tentang kekuatan-kekuatan sosial, ekonomi, dan politik guna memperbaiki kedudukan di masyarakat.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan upaya memampukan atau memandirikan masyarakat agar dapat mengembangkan kemampuannya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Menurut Remiswal (2013: 35), partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilakukan dengan cara:

- (a) Adanya kontak dengan pihak lain merupakan titik awal perubahan sosial. (b) Menyerap atau memberikan tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat atau menolaknya. (c) Turut dalam perencanaan

pembangunan serta pengambilan keputusan. (d) Terlibat dalam operasional pembangunan. (e) Turut menerima, memelihara dan mengembangkan pembangunan. (f) Menilai pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan hasilnya memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka partisipasi perempuan yang dimaksudkan adalah bentuk kesediaan perempuan secara sukarela dalam menunjang program-program baik atas inisiatif masyarakat lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka baik sifatnya individual maupun kolektif dalam model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pengambilan manfaat dari program-program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka.

*Women And Development* (WAD) merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. Menurut Julia Cleves Mosse, (2007: 208), pendekatan WAD menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka.

Menurut Julia Cleves Mosse, (2007: 209) pendekatan *Gender And Development* (GAD) merupakan satu-satunya pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan dan menolak

upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai “pemberdayaan”.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 (2012: 46) mencantumkan pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan. Memiliki kesamaan dengan definisi di atas, Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013 mendefinisikan, program pendidikan pemberdayaan perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan merupakan upaya memampukan atau memandirikan perempuan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan nonformal sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan luar sekolah atau yang dapat dikatakan pendidikan yang diperuntukkan bagi masyarakat, memiliki peranan untuk memberdayakan. Karena tujuan pendidikan luar sekolah adalah untuk memecahkan masalah-masalah keterlantaran pendidikan dengan memberikan bekal sikap, keterampilan dan pengetahuan yang tidak dapat dipenuhi dalam jalur pendidikan formal guna memperbaiki taraf kehidupannya.

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Pendekatan *Gender And Development* (GAD) merupakan suatu pendekatan yang dikenal sebagai pemberdayaan. Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal, dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka.

Organisasi perempuan menawarkan kemungkinan pemberdayaan dan perubahan pribadi, dan juga memberikan konteks bagi transformasi pribadi ini menuju aksi politik. Kelompok perempuan yang paling berhasil adalah kelompok-kelompok yang bergerak di sekitar kebutuhan khusus, misalnya dalam bidang kesehatan atau pekerjaan, dan kemudian terus berjuang demi isu-isu jangka panjang.

#### **b. Pendekatan Pemberdayaan Perempuan**

Menurut Remiswal (2013: 36), partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari tiga pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu:

##### **1) Pendekatan *Women in Development* (WID)**

Pendekatan ini merupakan proses pengintegrasian perempuan dalam program pembangunan. Menurut Dharma (2002) pendekatan



WID berpijak pada dua sasaran, yaitu: (1) prinsip egalitarian, kepercayaan bahwa semua orang sederajat. (2) menitikberatkan pada pengadaan program yang dapat mengurangi diskriminasi yang dialami oleh perempuan dalam sektor produksi.

Menurut Rathgeber (Julia Cleves Mosse, 2007: 205), WID digunakan sebagai steno bagi pendekatan terhadap isu perempuan dan pembangunan yang sebagian besar didasarkan pada paradigma modernisasi. Julia Cleves Mosse, (2007: 205) menyatakan pendekatan WID difokuskan kepada inisiatif seperti pengembangan teknologi yang lebih baik, yang tepat, yang akan meringankan kerja perempuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendekatan WID ini bertujuan untuk menekankan sisi produktif kerja dan tenaga kerja perempuan dengan mengabaikan sisi reproduktifnya.

## **2) Pendekatan *Women And Development* (WAD)**

Pendekatan WAD merupakan tindak lanjut dari pendekatan terdahulu. Menurut Julia Cleves Mosse, (2007: 208), WAD merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi.

Menurut Julia Cleves Mosse, (2007: 208) pendekatan WAD menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan

komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. Sementara itu, menurut Dharma (2002) pendekatan WAD adalah menekankan pada hubungan antara perempuan dan proses pembangunan.

Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pendekatan WAD ini cenderung menitikberatkan pada kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan dan kurang memperhatikan tenaga perempuan yang digunakan.

### **3) Pendekatan *Gender And Development* (GAD)**

Menurut Remiswal (2013: 37) pendekatan ini lebih menekankan pada orientasi hubungan sosial dalam pembangunan. GAD memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. Sedangkan, menurut Julia Cleves Mosse, (2007: 209) pendekatan GAD merupakan pendekatan terhadap perempuan dalam pembangunan yang melihat semua aspek kehidupan perempuan dan semua kerja yang dilakukan perempuan dan menolak upaya apapun untuk menilai rendah pekerjaan mempertahankan keluarga dan rumah tangga, mulai dikenal sebagai “pemberdayaan”.

Pemberdayaan lebih terkait dengan pendekatan dari bawah ke atas (*bottom-up*) daripada pendekatan dari atas ke bawah (*top-down*). Pendekatan ini memahami tujuan pembangunan bagi perempuan dalam pengertian kemandirian dan kekuatan internal,

dan sedikit banyak lebih menekankan pada pembuatan undang-undang yang berkenaan dengan kesamaan antara laki-laki dan perempuan ketimbang pemberdayaan perempuan itu sendiri untuk berusaha mengubah dan mentransformasikan struktur yang sangat bertentangan dengan mereka.

### **c. Tujuan Pemberdayaan Perempuan**

Sumodiningrat (Rini Rinawati, jurnal Prosiding SnaPP 2010)

menjelaskan bahwa sasaran dan tujuan dari pemberdayaan adalah:

- 1) Meningkatnya peningkatan pendapatan perempuan di tingkat bawah dan menurunnya jumlah penduduk yang terdapat di bawah garis kemiskinan
- 2) Berkembangnya kapasitas perempuan untuk meningkatkan kegiatan sosial ekonomi produktif keluarga
- 3) Berkembangnya kemampuan perempuan dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, baik aparaturnya maupun warga.

Menurut Edi Suharto (2009: 60), tujuan umum pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal, maupun kondisi eksternal.

Berdasarkan pendapat di atas mengenai tujuan pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah proses pemberian kekuatan kepada kelompok masyarakat yang tidak berdaya terutama pada pengembangan kemampuan dan kapasitas perempuan sehingga dapat meningkatkan pendapatan perempuan dan meningkatkan kegiatan sosial ekonomi.

Mengenai pentingnya pendidikan bagi wanita, riset Bank Dunia (Saleh Marzuki, 2010: 59) memberikan jawaban bahwa investasi pada pendidikan wanita menghasilkan manfaat yang tinggi di bidang ekonomi dan sosial bagi individu, keluarga, dan masyarakat secara luas.

### **3. Kepercayaan (*Trust*)**

#### **a. Pengertian Kepercayaan (*Trust*)**

Putnam (John Field, 2010: 6) mendefinisikan modal sosial sebagai bagian dari organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma, dan jaringan, yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan terkoordinasi. Namun definisi Putnam (John Field, 2010: 51) tentang modal sosial sedikit berubah pada tahun 1990-an, ia menyatakan bahwa modal sosial adalah bagian dari kehidupan sosial, jaringan, norma dan kepercayaan yang mendorong partisipan bertindak bersama secara lebih efektif untuk mencapai tujuan-tujuan bersama.

Selanjutnya, Putnam (John Field, 2010: 51) berargumen bahwa gagasan inti dari modal sosial adalah jaringan sosial memiliki nilai, kontak sosial memengaruhi produktivitas individu dan kelompok. Istilah itu sendiri didefinisikan Putnam (John Field, 2010: 51) merujuk pada hubungan antar individu, jaringan sosial dan norma resiprositas dan kepercayaan yang tumbuh dari hubungan-hubungan tersebut.

Sejumlah penulis menyatakan bahwa agar orang bekerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan mereka, mereka tidak hanya harus

mengenal satu sama lain sebelumnya, mereka perlu saling percaya, dan berharap bahwa jika mereka bekerja sama maka mereka tidak akan dieksploitasi atau ditipu, namun pada kesempatan lain bisa mengharapkan manfaat setimpal.

Putnam (Siti Irene Astuti, 2014: 10) mendefinisikan modal sosial: “by ‘*Social Capital*’ I mean features of social life – networks, norms, and trust – that enable participants to act together more effectively to pursue shared objectives.”. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Menurut Francis Fukuyama (2010: xii), modal sosial (*social capital*) secara sederhana bisa didefinisikan sebagai serangkaian nilai-nilai atau norma-norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok masyarakat yang memungkinkan terjalinnya kerjasama diantara mereka. Menurut Francis Fukuyama (2010) ada tiga bentuk modal sosial yakni kepercayaan atau *trust*, norma-norma atau *norms* dan jaringan-jaringan atau *networks*.

Sementara itu, Francis Fukuyama (John Field, 2010: 102) mendefinisikan kepercayaan itu sendiri sebagai unsur dasar modal sosial. Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan abadi di tengah-tengah masyarakat atau pada bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Sejalan dengan itu, ilmuwan politik Eric Uslaner

(John Field, 2010: 102), berargumen bahwa modal sosial terutama merefleksikan sistem nilai, khususnya kepercayaan sosial. Fukuyama juga berpendapat bahwa kepercayaan adalah dasar dari tatanan sosial, komunitas tergantung pada kepercayaan timbal balik dan tidak muncul secara spontan tanpanya.

*Trust* didefinisikan oleh Fukuyama (2010: xiii) sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota komunitas itu. Sementara itu, Dasgupta (John Field, 2010: 103) berpendapat, kepercayaan bisa menjadi atribut institusi dan kelompok maupun individu, dan seringkali didasarkan atas reputasi yang diperantarai oleh pihak ketiga.

Menurut Lawang (2004: 46), terdapat tiga hal inti yang saling terkait dalam kepercayaan, yaitu:

- (1) *Hubungan* sosial antara dua orang atau lebih, termasuk dalam hubungan ini adalah institusi, yang dalam hal ini diwakili oleh orang. Seseorang percaya pada institusi tertentu untuk kepentingannya, karena orang-orang dalam institusi itu bertindak.
- (2) *Harapan* yang akan terkandung dalam hubungan itu, yang apabila direalisasikan tidak akan merugikan salah satu atau kedua belah pihak.
- (3) *Interaksi sosial* yang memungkinkan hubungan dan harapan itu terwujud.

Dengan ketiga dasar tersebut kepercayaan dapat disimpulkan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengandung harapan yang menguntungkan salah satu atau kedua belah pihak melalui interaksi sosial.

Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka. Kepercayaan sosial muncul dari adanya interaksi antara orang-orang dalam suatu kelompok atau komunitas sehingga membentuk hubungan dan jaringan kerja dari keterkaitan warga masyarakat. Dengan adanya rasa saling percaya, tidak diperlukan pengawasan terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan yang diharapkan.

Hasbullah (2006: 9), menyatakan bahwa berbagai tindakan kolektif yang didasari atas rasa saling percaya dan mempercayai yang tinggi akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai macam bentuk dan dimensi terutama dalam konteks membangun kemajuan bersama. Ketiadaan rasa saling percaya dalam masyarakat akan mengundang berbagai masalah sosial yang serius. Masyarakat yang kurang memiliki rasa saling percaya akan sulit menghindari berbagai situasi kerawanan sosial dan ekonomi yang mengancam. Semangat kolektifitas dan partisipasi masyarakat untuk membangun bagi kepentingan kehidupan yang lebih baik akan hilang. Lambat laun akan mendatangkan biaya tinggi bagi pembangunan karena masyarakat cenderung bersikap apatis dan hanya menunggu apa yang diberikan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain. Jika rasa saling mempercayai sudah lemah, maka yang akan terjadi adalah sikap-sikap yang menyimpang dari nilai dan norma yang berlaku, kriminalitas akan

meningkat, tindakan-tindakan destruktif dan anarkis mudah mencuat, kekerasan dan kerusuhan massa akan cepat tersulut.

Selanjutnya, Fukuyama (2010: xiii) menyebutkan *trust* bermanfaat bagi penciptaan tatanan ekonomi unggul karena bisa diandalkan untuk mengurangi biaya (*costs*). Dalam bisnis, *trust* bisa mengurangi keinginan menghindari situasi yang tak terduga dan mencegah pertikaian dan sengketa. Dengan *trust*, orang-orang bisa bekerja sama secara lebih efektif. Hal ini dimungkinkan karena ada kesediaan diantara mereka untuk menempatkan kepentingan kelompok di atas kepentingan individu. Secara umum masyarakat *high-trust* memiliki solidaritas yang sangat tinggi, yang mengakibatkan rakyat mau ikut bekerja sama mengikuti aturan, sehingga ikut memperkuat rasa kebersamaan. Sementara itu, masyarakat *low-trust*, dianggap lebih inferior dalam perilaku ekonomi kolektifnya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya dasar terbentuknya modal sosial adalah rasa percaya (*trust*). Kepercayaan (*trust*) menjadi pengikat masyarakat. Pada masyarakat '*Low Trust*' ikatan kelembagaan /institusi diikat oleh keanggotaan dalam keluarga. Karena dalam ikatan keluarga *trust* tidak perlu dipermasalahkan. Anggota keluarga adalah bagian diri sendiri. Selain ini pada kelompok multi etnik, kepercayaan antar anggota etnik yang sama lebih mudah berkembang daripada antar etnik.



Putnam sebagaimana dijelaskan oleh Rachmawati (2015: 19) menunjukkan bukti bahwa pertumbuhan ekonomis sangat berkorelasi dengan kehadiran modal sosial. Pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan baik apabila ciri-ciri berikut ini dimiliki oleh masyarakat :

- 1) Hadirnya hubungan yang erat antar anggota masyarakatnya.
- 2) Adanya para pemimpin yang jujur dan egaliter yang memperlakukan dirinya sebagai bagian dari masyarakat bukan sebagai penguasa
- 3) Adanya rasa saling percaya dan kerjasama di antara unsur masyarakat.

Putnam (Nidia Desi Utami, 2014: 13), *Trust* atau rasa saling percaya adalah bentuk keinginan mengambil resiko dalam hubungan—hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya.

Menurut Morgan dan Hunt (Tatang Kusmayadi, 2007:39) menjelaskan bahwa:

*“trust is a willingness to rely on exchange partner in whom one has confidence on the part of trusting party result from the firm belief that the trustworthy party is reliable and has high integrity, which are associated with such qualities as consistence, competent, honest, fair, responsible, helpful and benevolence”*

Kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya kepada pihak lain yang memang mempunyai kualitas yang dapat mengikat dirinya, seperti tindakannya yang konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka. membantu dan rendah hati.

Beberapa literatur telah mendefinisikan *trust* dengan berbagai pendekatan. Pada awalnya *trust* banyak dikaji dari disiplin psikologi, karena hal ini berkaitan dengan sikap seseorang. Pada perkembangannya, *trust* menjadi kajian berbagai disiplin ilmu. Morgan dan Hunt mendefinisikan bahwa *trust* akan terjadi apabila seseorang memiliki kepercayaan diri dalam sebuah pertukaran dengan mitra yang memiliki integritas dan dapat dipercaya (dalam Kirana Nadhifah, 2011: 10). Sedangkan, Menurut Mayer *et al.* (Kirana Nadhifah, 2011: 10) mendefinisikan *trust* sebagai kemauan seseorang untuk peka terhadap tindakan orang lain berdasarkan pada harapan bahwa orang lain akan melakukan tindakan tertentu pada orang yang mempercayainya, tanpa tergantung pada kemampuannya untuk mengawasi dan mengendalikannya.

Definisi lain disampaikan oleh Ba dan Pavlou (Kirana Nadhifah, 2011:10) yang menyatakan bahwa *trust* adalah penilaian hubungan seseorang dengan orang lain yang akan melakukan transaksi tertentu menurut harapan orang kepercayaannya dalam suatu lingkungan yang penuh ketidakpastian. Sementara itu, Rousseau *et al.* (Kirana Nadhifah, 2011:10) mendefinisikan *trust* adalah wilayah psikologis yang

merupakan perhatian untuk menerima apa adanya berdasarkan harapan terhadap perhatian atau perilaku yang baik dari orang lain.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa, Kepercayaan sebagai produk dari modal sosial ini menjadi landasan dalam hubungan antar manusia. Dalam membangun suatu hubungan antar manusia dilandasi adanya rasa saling percaya yang didasari perasaan yakin bahwa ada perasaan aman dalam berinteraksi dengan orang lain atau keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.. Dengan adanya kepercayaan, dapat menumbuhkan harapan yang sesuai dengan norma-norma yang dianut bersama sehingga mewujudkan langgengnya hubungan kerjasama dalam masyarakat.

#### **b. Faktor Pembentuk Kepercayaan (*Trust*)**

Menurut Mayer *et al.* dalam (Kirana Nadhifah, 2011: 11), faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*). Ketiga faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Kemampuan (*Ability*)**

Kemampuan mengacu pada kompetensi dan karakteristik penjual/organisasi dalam mempengaruhi dan mengotorisasi wilayah yang spesifik. Dalam hal ini, bagaimana pengelola mampu menyediakan, melayani, sampai mengamankan transaksi dari gangguan pihak lain. Artinya bahwa konsumen atau dalam hal ini

yaitu anggota kelompok memperoleh jaminan kepuasan dan keamanan dari pengelola dalam melakukan transaksi. Kim *et al.* (Kirana Nadhifah, 2011: 11), menyatakan bahwa *ability* meliputi kompetensi, pengalaman, pengesahan institusional, dan kemampuan dalam ilmu pengetahuan.

2) Kebaikan hati (*Benevolence*)

Kebaikan hati merupakan kemauan penjual dalam memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dengan konsumen. Keuntungan yang diperoleh dapat dimaksimumkan, tetapi kepuasan konsumen atau anggota kelompok juga tinggi. Pengelola bukan semata-mata mengejar profit maksimum semata, melainkan juga memiliki perhatian yang besar dalam mewujudkan kepuasan anggota kelompok. Menurut Kim *et al.* (Kirana Nadhifah, 2011: 11), *benevolence* meliputi perhatian, empati, keyakinan, dan daya terima.

3) Integritas (*Integrity*)

Integritas berkaitan dengan bagaimana perilaku atau kebiasaan penjual dalam menjalankan bisnisnya. Informasi yang diberikan kepada konsumen apakah benar sesuai dengan fakta atau tidak. Kualitas produk yang dijual apakah dapat dipercaya atau tidak. Kim *et al.* (Kirana Nadhifah, 2011: 11) mengemukakan bahwa *integrity* dapat dilihat dari sudut kewajaran (*fairness*),

pemenuhan (*fulfillment*), kesetiaan (*loyalty*), keterus-terangan (*honestly*), keterkaitan (*dependability*), dan kehandalan (*reliability*).

Selain itu, menurut Fortenot et al., 1997 (Tatang Kusmayadi, 2007: 39), unsur-unsur kepercayaan pelanggan untuk melakukan hubungan dengan perusahaan dapat ditunjukkan dengan:

- 1) Rasa peduli dan perhatian (*benevolence*), yaitu tindakan-tindakan penyelenggara program baik langsung atau tidak langsung untuk memberikan perhatian dan kepedulian pada pelanggannya dan dengan harapan tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan anggota kelompok.
- 2) Kejujuran (*honesty*), yaitu perasaan percaya dari anggota kelompok bahwa pengelola akan selalu menepati janji-janjinya dan pengelola akan selalu menepati akan informasi yang diberikannya
- 3) Kredibilitas perusahaan (*credibility*), yaitu rasa percaya pada pengelola karena kredibilitas pengelola ditunjukkan dari tingkat pengetahuan sumber daya manusia dalam memberikan informasi tentang program yang diselenggarakan serta mengerti kesulitan-kesulitan yang dirasakan anggota kelompok
- 4) Kehandalan (*competence*), yaitu rasa percaya pada pengelola karena kehandalan dari pengelola ditunjukkan dari tindakan-tindakan pengelola dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi anggota kelompok.

### c. Fungsi Kepercayaan (*Trust*)

Mollering menjelaskan, terdapat enam fungsi penting kepercayaan (*trust*) dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan (dalam Arya Hadi Dharmawan, 2002: 4). Keenam fungsi tersebut adalah:

- 1) Kepercayaan dalam arti *confidence*, yang bekerja pada ranah psikologis individual. Sikap ini akan mendorong orang berkeyakinan dalam mengambil satu keputusan setelah memperhitungkan resiko-resiko yang ada
- 2) Kerjasama, yang berarti pula sebagai proses sosial asosiatif dimana kepercayaan (*trust*) menjadi dasar terjalinnya hubungan-hubungan antar individu tanpa dilatarbelakangi rasa saling curiga. Selanjutnya, semangat kerjasama akan mendorong integrasi sosial yang tinggi
- 3) Penyederhanaan pekerjaan, dimana kepercayaan (*trust*) membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja kelembagaan-kelembagaan sosial
- 4) Ketertiban, kepercayaan (*trust*) berfungsi sebagai *inducing behaviour* setiap individu, yang ikut menciptakan suasana kedamaian dan meredam kemungkinan timbulnya kekacauan sosial dan menciptakan tatanan sosial yang teratur, tertib dan beradab.
- 5) Pemelihara kohesivitas sosial. Kepercayaan (*trust*) membantu merekatkan setiap komponen sosial yang hidup dalam sebuah komunitas menjadi kesatuan yang tidak tercerai berai.

- 6) Modal sosial. Kepercayaan (*trust*) adalah aset penting dalam kehidupan kemasyarakatan yang menjamin struktur-struktur sosial berdiri secara utuh dan berfungsi secara operasional serta efisien.

**d. Manfaat Kepercayaan (*Trust*)**

Implikasi dari kepercayaan adalah mantapnya keyakinan dan kepercayaan diri di antara aktor-aktor dalam menjalin interaksi satu sama lain setelah melalui intensitas interaksi yang akuntabel dan transparan (Dedy Hermawan, 2008: 431).

Kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang antar individu maupun antar organisasi. Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membangun kepercayaan (*trust*) agar dapat menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain ataupun organisasi lain.

Kepercayaan merupakan hal penting bagi kesuksesan relationship. Manfaat (*benefit relationship*) yang didasarkan pada kepercayaan adalah signifikan dan menggambarkan hal-hal berikut:

*1) Cooperation*

Kepercayaan dapat meredakan perasaan ketidakpastian dan resiko, jadi bertindak untuk menghasilkan peningkatan kerjasama antar anggota *relationship*. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan, anggota belajar bahwa kerjasama memberikan hasil yang melebihi hasil yang lebih banyak dibandingkan apabila dikerjakan sendiri.

## 2) Komitmen

Komitmen merupakan komponen yang dapat membangun relationship dan merupakan hal yang mudah hilang, yang dapat dibentuk hanya dengan pihak-pihak yang saling percaya.

## 3) *Relationship Duration*

Kepercayaan mendorong anggota *relationship* bekerja untuk menghasilkan *relationship* dan untuk menahan godaan untuk tidak mengutamakan hasil jangka pendek dan atau bertindak secara oportunis. Kepercayaan dari penjual secara positif dihubungkan dengan kemungkinan bahwa pembeli akan terlibat dalam bisnis pada masa yang akan datang. Oleh karena itu kepercayaan itu memberikan kontribusi untuk meningkatkan durasi *relationship*.

## 4) Kualitas

Pihak yang percaya lebih mungkin untuk menerima dan menggunakan informasi dari pihak yang dipercaya, dan pada gilirannya menghasilkan manfaat yang lebih besar dari informasi tersebut. Akhirnya, adanya kepercayaan memungkinkan perselisihan atau konflik dapat dipecahkan secara efisien dan damai. Dalam kondisi tidak ada kepercayaan, perselisihan dirasakan merupakan tanda akan adanya kesulitan pada masa yang akan datang dan biasanya menyebabkan berakhirnya *relationship*. (<http://www.kajianpustaka.com/2016/05/pengertian-dan-manfaat-kepercayaan-trust.html>).



#### **e. Bentuk Relasi**

Dedy Hermawan (2008: 436) menyampaikan, kepercayaan (*trust*) yang bersifat timbal balik antara seluruh komponen *stakeholders* menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan *stakeholders* dan networking dalam mengatasi persoalan publik (*public affairs*) dan kepentingan publik (*public interest*).

#### **f. Tindakan Membangun Kepercayaan (*Trust*)**

Perilaku nyata dari dua individu yang terlibat dalam suatu hubungan adalah penting untuk mengetahui apakah kepercayaan dapat dibangun dalam hubungan itu atau tidak. Sebuah kepercayaan dapat meningkatkan dan merangsang hubungan organisasi dan membimbing perilaku yang akan membantu dalam membangun kepercayaan. Frederique Six (2005: 82) menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam membangun kepercayaan (*trust*). Tindakan dalam membangun kepercayaan (*trust*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1) Terbuka**

Terbuka dalam hal ini yaitu mengungkapkan informasi dengan cara yang akurat dan tepat waktu, memberikan *feedback* atau umpan balik yang positif maupun negatif, terbuka dan terarah dalam masalah pekerjaan, bersikap jujur dan terbuka tentang tujuan.

## 2) Berbagi pengaruh

Menurut Zand (Frederique Six, 2005: 83), pengaruh mengacu pada sumber-sumber informasi dan bagaimana informasi yang mengubah perilaku individu. Berbagi pengaruh berkaitan dengan memulai dan menerima perubahan untuk keputusan Anda, mencari dan menerima nasihat dari orang lain, memberi dan menerima bantuan. Mengakui legitimasi kepentingan masing-masing juga menyiratkan bahwa Anda membiarkan kepentingan orang lain mempengaruhi perilaku Anda.

## 3) Melimpahkan wewenang

Individu meningkatkan kerentanan mereka ketika mereka melimpahkan wewenang kepada orang lain dan memilih untuk tidak mengendalikan perilaku orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka dapat melakukan ini dengan membuat mereka sendiri tergantung pada tindakan orang lain, misalnya dengan melimpahkan tugas kepada orang lain atau memberikan tanggung jawab kepada orang lain, serta bertanggung jawab daripada membuat alasan atau menyalahkan orang lain.

## 4) Mengelola harapan bersama

Gabarro (1978) dan Johnson and Johnson (1995) sebagaimana dijelaskan dalam Frederique Six (2005: 83) menyarankan kategori keempat tindakan membangun kepercayaan (trust) adalah mengelola harapan bersama. Tindakan ini

menyiratkan bahwa perilaku dari kedua orang yang terlibat dapat dipengaruhi. Tindakan dalam kategori ini adalah untuk memperjelas harapan umum awal dan mengeksplorasi harapan tertentu secara rinci, mengungkapkan dan bernegosiasi mengenai perbedaan harapan serta memproses dan mengevaluasi seberapa efektif Anda bekerja bersama.

#### **4. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

##### **a. Pengertian Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Pengertian Unit Pengelola Kegiatan menurut Petunjuk Teknis Operasional (2011), bahwa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang mengelola dana Bantuan Masyarakat (BLM) – baik dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP dan SPP/dana bergulir.

##### **b. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

- 1) Tugas dan tanggung jawab umum:
  - a) Mengelola dana PPK maupun PNPM Mandiri di Kecamatan
  - b) Mengelola administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PPK maupun PNPM Mandiri
  - c) Mengelola dokumen-dokumen PPK maupun PNPM Mandiri

- d) Mengelola dana bergulir maupun BLM yang dialokasikan untuk UEP dan atau SPP, maupun dari sumber lain dari program pemerintah dna swasta
  - e) Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam
- 2) Tugas dan tanggung jawab khusus:
- a) Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM Mandiri dalam perencanaan dan pelestarian PNPM Mandiri
  - b) Melakukan administarsi dan pelaporan setiap transaksi keuangan maupun non keuangan
  - c) Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja
  - d) Membuat pertanggungjawaban keuangan dan realisasi rencana kerja kepada MAD
  - e) Melakukan evaluasi dan pemriksaan RPD dan LPD yang dibuat desa dalam setiap tahapan proses
  - f) Melakukan bimbingan teknis dan pemeriksaan administrasi pelaporan pelaku desa
  - g) Membuat draf rencana perguliran yang sesuai dengan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri
  - h) Melakukan fasilitasi kerjasama dengan pihak lain dalam kaitannya dengan pengembangan potensi wilayah
  - i) Melakukan penguatan kelompok peminjam dalam kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman

dan memfasilitasi pengembangan usaha kelompok dana pemanfaat

- j) Membantu pengembangan kapasitas pelaku program melalui pelatihan, bimbingan lapangan dan pendampingan dalam setiap tahapan kegiatan
- k) Mendorong transparansi dalam pengelolaan keuangan, pengelolaan pinjaman, perkembangan program dan informasi lainnya
- l) Bersama pelaku lainnya melakukan fasilitasi penyelesaian masalah

## **B. Penelitian yang Relevan**

Beberapa penelitian yang relevan akan disampaikan dengan tujuan dapat menjadi rujukan bagi peneliti untuk meneruskan maupun menemukan hal baru dari hasil penelitian.

1. Penelitian yang dilakukan oleh R. Rachmawati (2014) mempunyai tujuan penelitian untuk mengetahui dinamika modal sosial yang dimiliki masyarakat Desa Karangrejek dan Desa Bleberan dalam pengelolaan BUM Desa serta mengetahui kontribusi dan peranan modal sosial terhadap pengelolaan BUM Desa di dua desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah di atas adalah kualitatif, dengan teknik sampling sampel bertujuan (*purposive sampling*), untuk mendapatkan data secara alamiah, dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif

deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah penulis mendapatkan tiga tahap proses dinamika modal sosial dalam pengelolaan BUM Desa di desa Karangrejek dan Desa Bleberan, yaitu tahap rekonstruksi, tahap transisi, dan tahap kemampunan.

2. Penelitian yang dilakukan Dwi Rajibianto (2010) memiliki esensi pokok dalam penelitian ini menekankan pada bagaimana mekanisme yang terbentuk diantara pengrajin melalui faktor non ekonomis berupa modal sosial dan nilai-nilai agama yang dianut bersama sebagai strategi untuk penguatan usaha. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam. Temuan dalam penelitian ini adalah modal sosial yang diterapkan oleh para pengrajin genteng soka di Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan usaha mereka. Modal sosial menjadikan usaha genteng mereka semakin maju.
3. Penelitian yang dilakukan Entoh Tohani (2016) mempunyai tujuan penelitian untuk: a) memahami dampak pendidikan kewirausahaan masyarakat (PKuM) dalam rangka mengembangkan masyarakat, b) memahami pendayagunaan modal sosial dalam pendidikan kewirausahaan masyarakat dalam upaya memberdayakan masyarakat, dan c) mendapatkan pola pengembangan pendidikan kewirausahaan masyarakat berbasis modal sosial guna memberdayakan masyarakat. Penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus

(*case study*). Penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, dampak PKuM yang telah dilaksanakan mampu memberdayakan warga masyarakat yang memiliki keinginan untuk maju baik secara individual maupun kelompok. Kedua, pendayagunaan modal sosial dalam upaya menyukseskan usaha wirausaha dilakukan oleh para pelaku wirausaha atau kelompok sasaran dengan tingkat kuantitas dan kualitas pendayagunaan yang berbeda-beda. Ketiga, dihasilkan pola pendidikan berbasis modal sosial yang mengacu pada pemikiran pokok yaitu pendayagunaan dan pengembangan modal sosial pada aspek konteks, input, proses, output, dan outcome dalam konteks pengembangan masyarakat baik lokal, regional, maupun nasional.

### **C. Kerangka Pikir**

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya memampukan atau memandirikan perempuan dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis melalui pendidikan nonformal sebagai upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan.

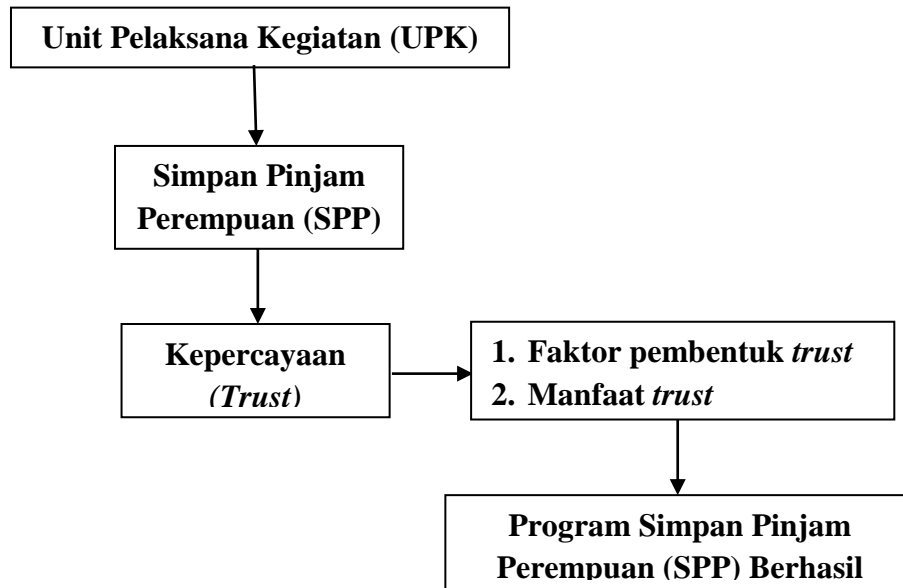
Salah satu penyelenggara program pemberdayaan perempuan adalah Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Melalui observasi dan wawancara yang dilakukan, diperoleh gambaran umum mengenai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa, yang dalam pelaksanaannya mempunyai dua program yang termasuk program pemberdayaan, yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Program tersebut mempunyai tujuan untuk

memberdayakan masyarakat terutama kaum perempuan melalui program dana bergulir.

Keberhasilan suatu program dipengaruhi banyak faktor. Begitu pula keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Dari sekian banyak faktor, faktor kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting terhadap keberlangsungan program tersebut. Tanpa adanya rasa percaya akan sulit membangun kerjasama. Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka. Dengan adanya rasa saling percaya, tidak diperlukan kegiatan monitoring terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan yang kita inginkan.

Penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 1.





Gambar 1. Kerangka Berpikir

#### D. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?
  - a. Siapa saja yang terlibat dalam membangun kepercayaan (*trust*)?
  - b. Apa saja usaha yang dilakukan dalam membangun kepercayaan (*trust*)?
  - c. Apa saja manfaat kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
2. Apa saja faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?

3. Apa saja faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) pada program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan keseluruhan cara atau kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian dimulai dari merumuskan masalah sampai dengan penarikan suatu kesimpulan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 60), pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Sementara Lexy Moleong (2014: 6) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Pada pendekatan kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Fokus penelitiannya ada pada persepsi dan pengalaman informan dan cara mereka memandang kehidupannya. Sehingga tujuannya bukan untuk memahami realita tunggal, tetapi realita majemuk. Penelitian kualitatif memusatkan perhatian pada proses yang berlangsung dan hasilnya.

Menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2014: 3) ada beberapa jenis dalam penelitian kualitatif yaitu etnografi, inkuiri naturalistik, etnometodologi, ekologis dan studi kasus. Penelitian kualitatif ini lebih spesifik diarahkan pada jenis studi kasus. Menurut Creswell (Imam Gunawan, 2013: 115) menjelaskan studi kasus merupakan penelitian dimana peneliti itu menggali suatu fenomena (kasus) tertentu dalam suatu waktu atau kegiatan serta mengumpulkan informasi secara terinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode tertentu. Penelitian studi kasus sebagai salah satu strategi penelitian kualitatif. Jenis studi kasus dilakukan untuk mengungkap secara terperinci dan menyeluruh terhadap objek peneliti.

Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif jenis studi kasus berupaya menggambarkan apa yang sudah diamati, didengar, dirasakan dan dipikirkan dari suatu gejala, fenomena atau kasus di lapangan secara terperinci dan mendalam. Penelitian ini menggambarkan kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, serta faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Berdasarkan penjabaran diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus.

## **B. Penentuan Subyek dan Obyek Penelitian**

Penentuan subjek dan objek penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh segala informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

### **1. Penentuan Subyek Penelitian**

Pemilihan subyek penelitian dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel secara bertujuan (*pusposive sampling technique*). Penentuan ini berdasarkan pernyataan Sugiyono (2008: 300) bahwa penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai maupun diobservasi dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sementara itu menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 101) sampel *purposive* memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam. Sampel tersebut dipilih karena menjadi sumber dan kaya akan informasi tentang fenomena yang ingin diteliti.

Penetapan subyek penelitian dalam penelitian ini didasarkan atas pertimbangan bahwa informan dapat memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian dan aspek-aspek yang akan diulas lebih lanjut dalam penelitian ini, khususnya mengenai kebermanfaatan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

Subyek dalam penelitian ini adalah anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Selain subyek utama anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tersebut, peneliti juga mengumpulkan data melalui sumber informasi atau *key informan*. Sumber informasi atau *key informan* yang memiliki cukup informasi tentang fokus penelitian adalah pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

## **2. Penentuan Obyek Penelitian**

Burhan Bungin (2011: 78) menjelaskan obyek dan informan penelitian kualitatif adalah menjelaskan obyek penelitian yang fokus pada penelitian, yaitu apa yang menjadi sasaran. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Adapun yang menjadi obyek dari penelitian ini adalah kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan kepercayaan dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa Kabupaten Tegal.

## **C. Setting Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Tempat penelitian berlokasi di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang beralamatkan di Desa Bumijawa, Kecamatan

Bumijawa, Kabupaten Tegal. Selain itu penelitian juga dilakukan di rumah anggota kelompok pemberdayaan perempuan.

## **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian untuk mengumpulkan data yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016. Wawancara terhadap pengelola akan dilaksanakan pada hari aktif yang diterapkan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Kemudian wawancara terhadap anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) akan dilakukan sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dan kegiatan observasi dan dokumentasi akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan data penelitian.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2008: 308) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utamanya dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam penelitian kualitatif ini yang berperan menjadi instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sugiyono (2008: 306) peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan.

Untuk mendapatkan data mengenai kebermanfaatan kepercayaan (trust) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, digunakan pedoman wawancara,

observasi, dan dokumentasi. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

### **1. Observasi**

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 220), observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Pada intinya, observasi dilakukan untuk mencari data dan informasi yang diperlakukan melalui pengamatan.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Metode observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data penelitian yang bersifat nyata dan bisa diamati, yang berkaitan dengan organisasi, fasilitas dan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

### **2. Wawancara**

Menurut Lexy Moleong (2014: 186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.



Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara mendalam kepada anggota kelompok pemberdayaan perempuan yaitu anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam bentuk tanya jawab dan diskusi. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan terlebih dahulu mempersiapkan pedoman wawancara dengan model pertanyaan terbuka, tidak kaku, fleksibel dan disampaikan secara informal.

Tujuan wawancara adalah untuk memperoleh informasi dan data yang obyektif dan lengkap yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara digunakan peneliti untuk mengumpulkan data tentang organisasi, fasilitas dan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pembentukan kepercayaan dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa Kabupaten Tegal.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada di lokasi penelitian. Menurut Sugiyono (2008: 82) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Sementara itu menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2006: 221-222), studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Lexy Moleong (2014: 217) berpendapat teknik dokumentasi telah lama dipergunakan dalam penelitian sebagai sumber data. Karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk mengkaji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

Penggunaan studi dokumentasi dalam penelitian ini guna melengkapi data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti berupa gambar atau foto yang berkaitan dengan organisasi, fasilitas dan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa.

#### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data di lapangan. Lexy Moleong (2014: 9) menyatakan, dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Dalam hal ini, hanya manusia sajalah yang dapat memahami kaitan kenyataan di lapangan, dan dapat berhubungan secara langsung dengan responden. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti merupakan instrumen utama. Peneliti pada waktu mengumpulkan data di lapangan ikut berperan serta dalam penelitian dengan didukung instrumen pendukung. Instrumen pendukung yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

Adapun kisi-kisi instrumen yang digunakan dalam penelitian mengenai Kepercayaan (*Trust*) dalam Program Pemberdayaan Perempuan dapat dibaca pada tabel 1.

Tabel 1. Kisi-Kisi Instrumen

Aspek	Sub Aspek	Sumber Data	Metode Pengumpulan Data
Organisasi	a. Struktur organisasi b. Sejarah c. Visi dan misi d. Tujuan	Pengelola UPK	Observasi Wawancara Dokumentasi
Fasilitas	a. Sarana dan prasarana b. Jenis dan jumlah c. Kondisi	Pengelola UPK Anggota SPP	Observasi Wawancara Dokumentasi
Program Simpan Pinjam Perempuan	a. Latar belakang program b. Tujuan program c. Sasaran program d. Pelaksanaan	Pengelola UPK Anggota SPP	Observasi Wawancara Dokumentasi
Kepercayaan ( <i>trust</i> )	a. Fungsi kepercayaan ( <i>trust</i> ) b. Bentuk relasi c. Wujud kepercayaan ( <i>trust</i> ) d. Manfaat kepercayaan ( <i>trust</i> ) e. Tindakan membangun ( <i>trust</i> )	Pengelola UPK Anggota SPP	Wawancara
Faktor pendukung pembentuk kepercayaan ( <i>trust</i> )	a. Faktor pendukung internal b. Faktor pendukung eksternal	Pengelola UPK Anggota SPP	Wawancara
Faktor penghambat pembentuk kepercayaan ( <i>trust</i> )	a. Faktor penghambat internal b. Faktor penghambat eksternal	Pengelola UPK Anggota SPP	Wawancara

## **F. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy Moleong, 2014: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Definisi lain disampaikan Lexy Moleong (2014: 280) yang menyatakan bahwa analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Lexy Moleong (2014: 281) berpendapat bahwa analisis data dalam pelaksanaannya sudah mulai dilakukan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif sesudah meninggalkan lapangan penelitian. Dengan kata lain, analisis data dan penafsirannya secepatnya dilakukan oleh penulis. Sejalan dengan pendapat tersebut, Sugiyono (2008: 91) menyampaikan bahwa data yang dikumpulkan dalam setiap pertemuan langsung dilakukan analisis data.

Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Secara lebih jelas dijabarkan sebagai berikut:

### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Sugiyono (2008: 338) menyatakan, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

### **2. Display Data (*Data Display*)**

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian data. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

Tujuan dari display data dalam penelitian ini yaitu memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### **3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing Verification*)**

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Data yang telah diperoleh

dihubungkan dan dibandingkan dengan lainnya sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap permasalahan yang ada. Kesimpulan dalam penelitian yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Menurut Sugiyono (2008: 345), temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

#### **G. Keabsahan Data**

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Menurut Lexy Moeloeng (2014: 330) triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Denzin (Lexy Moleong, 2014: 331) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Trianggulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari beberapa sumber kemudian dideskripsikan, dikategorikan, kemudian dianalisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti akan membandingkan data yang telah diperoleh dari *key informan* yang satu dengan *key informan* yang lain. Dalam hal ini, peneliti membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari pengelola

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa**

###### **a. Lokasi dan Keadaan Lembaga**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa terletak di wilayah Kabupaten Tegal tepatnya di Kecamatan Bumijawa. Kecamatan Bumijawa yang terletak di Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah ini terdiri dari 18 Desa, dengan jumlah penduduk 92.659 jiwa, 18.532 KK. Sebagian warga memiliki mata pencaharian bertani selain itu, ada yang bekerja sebagai pedagang, swasta, PNS. Sebanyak 72 persen KK di Kecamatan ini dikategorikan sebagai KK miskin. Desa termiskin di Kecamatan Bumijawa ini adalah Desa Dukuh Benda. Rata-rata penghasilan warga Rp.8.000,- per hari. Sebagian besar (90 persen) warga kecamatan ini berpendidikan SD.

Beralamatkan di Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berada pada wilayah yang strategis dan mudah untuk dijangkau karena berada satu wilayah dengan Kantor kecamatan Bumijawa dan terletak di samping jalan utama di Kecamatan Bumijawa. Lembaga ini memiliki beberapa ruang, salah satunya ruang sekretariat yang digunakan untuk melayani kelompok peminjam. Selain itu, Unit Pengelola Kegiatan (UPK)



Kecamatan Bumijawa juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan maupun program yang diselenggarakan.

#### **b. Sejarah**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah lembaga yang mengelola dana Bantuan Masyarakat (BLM) – baik dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) maupun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dapat dialokasikan untuk berbagai jenis kegiatan yang mencakup kegiatan sarana/prasarana, pendidikan, kesehatan, UEP dan SPP/dana bergulir.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri adalah program nasional dari pemerintah sebagai upaya penanggulangan kemiskinan yang terutama berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Salah satu program pokok PNPM Mandiri adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang dilakukan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di dalam mengimplementasikan kegiatannya melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). UPK merupakan lembaga yang dibentuk oleh forum MAD (Musyawarah Antar Desa) sebagai lembaga pengelola dana PNPM Mandiri Perdesaan baik dana hibah ke masyarakat dan dana pinjaman bergulir dengan fungsi memberikan pelayanan kepada

masyarakat miskin dengan tetap melibatkan masyarakat secara umum. Keberadaan lembaga Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai salah satu pelaku PNPM Mandiri Pedesaan di tingkat kecamatan memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka mengimplementasikan kegiatan yang dilaksanakan oleh program PNPM Mandiri Perdesaan.

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang berkedudukan di tingkat kecamatan terbentuk pada Maret tahun 1999 melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berasal dari adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mengadakan program-program dalam rangka pengembangan desa sehingga dituntut adanya lembaga yang mengelola keuangan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini dalam pelaksanaannya mempunyai dua program yang termasuk dalam program pemberdayaan, yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sampai akhir tahun 2013, Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa melayani 191 kelompok SPP dan 30 kelompok UEP. Terdiri atas 221 Kelompok Perguliran dengan jumlah total pemanfaat sebanyak 3.056 yang tersebar pada 18 desa. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa sendiri mempunyai prestasi yaitu termasuk dalam 10 besar pengelolaan sehat tingkat provinsi.

**c. Visi dan Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa memiliki visi dan misi sebagai berikut:

**1) Visi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa**

“Menjadikan suatu lembaga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, berdaya guna dan dipercaya agar kemiskinan di masyarakat Kecamatan Bumijawa semakin berkurang”. Visi ini diwujudkan dengan melayani masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

**2) Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa**

Selain memiliki visi, Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Bumijawa juga memiliki misi, sebagai berikut

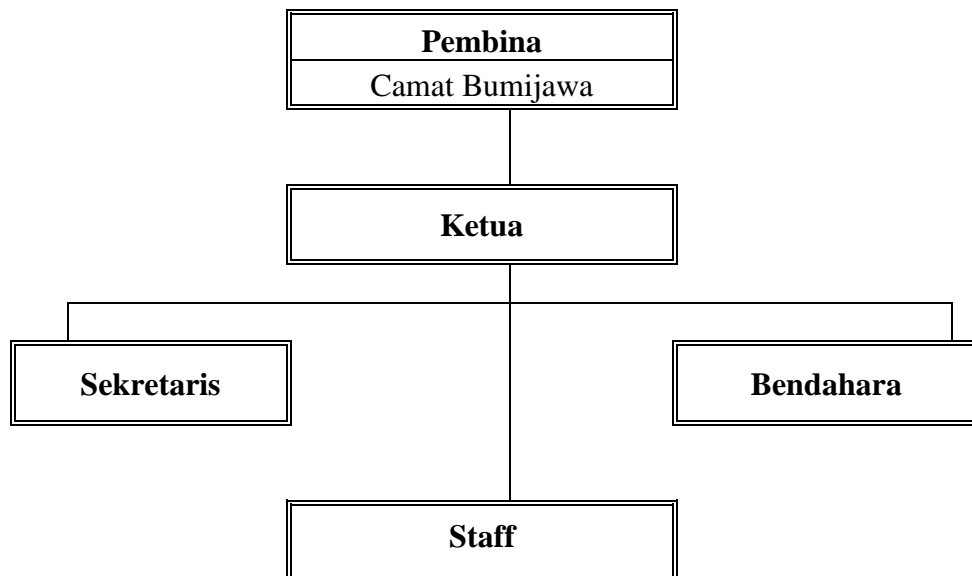
- a) Melestarikan dan mengembangkan hasil program pembangunan dengan sistem partisipatif diantaranya PPK-PNPM
- b) Melestarikan kelembagaan dan kegiatan dari program pemberdayaan partisipatif diantaranya yang telah dilakukan PPK-PNPM
- c) Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat

- d) Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan
- e) Mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan prinsip BKAD
- f) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional dan global.

**d. Struktur Organisasi**

Pengelola di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berjumlah 5 orang. Struktur kepengurusan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa mencakup Ketua, sekretaris, bendahara dan 2 orang staff. Struktur kepengurusan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dapat dilihat pada gambar 2.

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) BUMIJAWA  
KABUPATEN TEGAL**



Gambar 2. Struktur Organisasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa

Uraian tugas dari masing-masing pengurus dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1) Pembina

- a) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan PNPM-PPK di wilayah kecamatan
- b) Menyelenggarakan Musyawarah Antar Desa
- c) Bersama FK dan PjOK mensosialisasikan PNPM\_PPK di wilayah kecamatan
- d) Monitoring dan mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM-PPK dari semua desa
- e) Membantu penyelesaian masalah PNPM-PPK yang timbul di wilayahnya

- f) Melayani urusan administratif, antara lain: menandatangani surat penetapan tim verifikasi, pengurus UPK, usulan kegiatan, Surat Perjanjian Pemberian Bantuan (SPPB) dan Surat Pernyataan Penyelesaian Kegiatan (SP2K) yang dibuat oleh Ketua TPK dan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PjOK), dll
  - g) Memantau proses pemeliharaan dan rencana pengembangan hasil kegiatan serta pengembalian pinjaman dana bergulir
  - h) Menilai kinerja program di desa dan di kecamatan.
- 2) Ketua
- a) Pengendalian organisasi UPK secara menyeluruh
  - b) Memberikan informasi kegiatan UPK ke masyarakat
  - c) Memimpin rapat pengurus UPK
  - d) Melakukan pembinaan manajemen dan administrasi kepada staf pengurus UPK dan kelompok SPP
  - e) Menandatangani surat-surat penting
  - f) Mewakili lembaga UPK dalam pertemuan dengan lembaga terkait
  - g) Menyetujui atau menolak pengajuan penggunaan dana dari sekretaris atau bendahara
  - h) Melakukan penagihan pada kelompok SPP yang tidak lancar atau macet

- i) Menyampaikan hal-hal penting yang diperlukan dalam pembinaan dan pemeriksaan
  - j) Mempertanggungjawabkan pengelolaan UPK kepada masyarakat dalam bentuk laporan pertanggungjawaban pengurus UPK.
- 3) Sekretaris
- a) Bertanggungjawab atas segala pengarsipan dokumen administrasi UPK, berupa administrasi laporan, administrasi keuangan, surat menyurat dan dokumen proses kegiatan PNPM
  - b) Melakukan pembinaan administrasi dan manajemen kepada kelompok SPP
  - c) Menyampaikan informasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kepada masyarakat
  - d) Mengisi dan mencatat agenda harian
  - e) Mencatat hasil keputusan rapat
  - f) Melakukan pencatatan transaksi pada pembukuan
  - g) Merencanakan kebutuhan pengadaan barang ATK dan inventaris UPK
  - h) Membuat laporan bulanan atau laporan lainnya
  - i) Melakukan penagihan pada kelompok SPP yang tidak lancar atau macet.

4) Bendahara

- a) Bertanggungjawab dalam pengelolaan keuangan UPK, baik kas tunai maupun rekening bank
- b) Mengamankan dan menyimpan buku rekening bank UPK
- c) Mencatat transaksi keuangan masuk dan keluar pada buku kas UPK dan buku bank UPK
- d) Menandatangani buku kas dan buku bank pada setiap tutu buku UPK
- e) Merealisasikan pencairan kepada kelompok SPP atas persetujuan ketua UPK
- f) Membuat laporan keuangan UPK setiap bulan
- g) Membuat perencanaan keuangan dan anggaran bersama Ketua dan Sekretaris UPK
- h) Menyetorkan dan menarik uang dari rekening bank atas persetujuan Ketua UPK
- i) Melakukan penagihan pada kelompok SPP yang tidak lancar atau macet.

5) Staff

- a) Membuat surat-surat dan laporan UPK
- b) Menjaga dan mengamankan data pada komputer
- c) Memasukkan transaksi harian keuangan UPK
- d) Membantu menyiapkan format administrasi dan laporan UPK



- e) Membantu melakukan penagihan ke kelompok SPP yang tidak lancar atau macet
- f) Menyampaikan laporan hasil operasi lapangan baik tertulis maupun lisan kepada Ketua UPK.

**e. Anggota Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

Anggota adalah orang yang menjadi bagian dari suatu kegiatan. Anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa hingga saat ini mencapai kurang lebih 200 kelompok.

Daftar anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dapat dibaca pada tabel 2.

Tabel 2. Daftar Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

No.	Desa	Kelompok
1.	Batumirah	10 kelompok
2.	Begawat	12 kelompok
3.	Bumijawa	10 kelompok
4.	Cempaka	10 kelompok
5.	Carul	4 kelompok
6.	Cawitali	13 kelompok
7.	Cintamanik	5 kelompok
8.	Dukuhbenda	22 kelompok
9.	Gunungagung	16 kelompok
10.	Guci	9 kelompok
11.	Jejeg	10 kelompok
12.	Pagerkasih	3 kelompok
13.	Muncanglarang	2 kelompok

**f. Fasilitas**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa terletak di Kabupaten Tegal tepatnya di Kecamatan Bumijawa, beralamatkan di

Desa Bumijawa Kecamatan Bumijawa. Sebuah lembaga perlu adanya sarana dan prasarana guna mendukung kegiatan atau program-program yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dalam mendukung program-program yang diselenggarakan adalah tanah dan gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang digunakan untuk melayani anggota kelompok peminjam.

Sarana dan prasarana dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dalam mendukung kegiatan dan program yang dilaksanakan dapat dibaca pada tabel 3.

Tabel 3. Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa

No.	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Kondisi
1.	Meja kantor	4 buah	Baik
2.	Meja komputer	3 buah	Baik
3.	Kursi	15 buah	Baik
4.	Lemari	5 buah	Baik
5.	Komputer	3 unit	Baik
6.	Kamera digital	1 unit	Baik
7.	Kendaraan	1 unit	Baik
8.	Kipas Angin	2 unit	Baik
9.	Papan nama	1 buah	Baik
10.	Papan kegiatan	1 buah	Baik

#### **g. Program atau Kegiatan**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini dalam pelaksanaannya mempunyai dua program yang termasuk dalam program pemberdayaan, yaitu program Simpan Pinjam Perempuan

(SPP) dan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sampai akhir tahun 2013, UPK Bumijawa melayani 191 kelompok SPP dan 30 kelompok UEP. Terdiri atas 221 Kelompok Perguliran dengan jumlah total pemanfaat sebanyak 3.056 yang tersebar pada 18 desa.

1) Latar Belakang Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dan merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan dari pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) itu sendiri merupakan kegiatan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini diselenggarakan dari tahun 2005. Hingga saat ini kelompok yang mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini mencapai kurang lebih 200 kelompok.

2) Tujuan program

Suatu program pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa

juga memiliki tujuan-tujuan yang telah dirumuskan. Tujuan ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan program, sehingga sesuai dan berkesinambungan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu:

a) Tujuan Umum

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan RTM.

b) Tujuan Khusus

- (1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.
- (2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.
- (3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.

3) Sasaran Program

Sasaran program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah RTM yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha

ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.

#### 4) Pelaksanaan

Bentuk kegiatan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

### **h. Jaringan dan Kerjasama**

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa tidak akan berjalan tanpa ada kerjasama dan dukungan dari beberapa pihak, antara lain: 1) Camat Bumijawa sebagai pembina pelaksanaan program PNPM-PPK oleh desa-desa di Kecamatan Bumijawa, 2) Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 3) BP-UPK yang mengawasi pengelolaan kegiatan, administrasi, dan keuangan yang dilakukan oleh UPK, 4) BKK untuk menyimpan tabungan.

## **2. Deskripsi Kelompok Al-Ikhlas**

### **a. Latar Belakang Berdirinya Kelompok Al-Ikhlas**

Kelompok Al-Ikhlas merupakan sebuah kelompok pengajian yang berada di Dusun Krajan Desa Gunungagung Kecamatan Bumijawa. Kelompok Al-Ikhlas bertujuan untuk menjalin silaturahmi ibu-ibu yang ada di Dusun Krajan Desa Gunungagung Kecamatan Bumijawa. Tujuan lain dari adanya kelompok jam'iyah ini adalah supaya ibu-ibu

mempunyai kegiatan yang lebih positif untuk mengisi waktu luang melalui kegiatan pengajian.

Kelompok Al-Ikhlas juga merupakan salah satu bagian dari kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan Kecamatan Bumijawa. Awal mula kelompok Al-Ikhlas mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah karena mayoritas anggotanya merupakan pedagang kecil dan membutuhkan modal. Melalui musyawarah Kelompok Al-Ikhlas berusaha mencari modal dagang yang lebih banyak dengan mencari lembaga yang bisa memberikan modal. Dari beberapa lembaga yang dihubungi, ternyata pinjaman yang diberikan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mempunyai kelebihan yaitu jasa yang lebih ringan serta prosedur peminjaman yang lebih mudah karena jaminan hanya *fotocopy* KTP.

#### **b. Susunan Pengurus Kelompok Al-Ikhlas**

Struktur kepengurusan Kelompok Al-Ikhlas terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Adapun struktur kepengurusan Kelompok Al-Ikhlas dapat dibaca pada tabel 4.

Tabel 4. Struktur Kepengurusan Kelompok Al-Ikhlas

No.	Nama	Usia	Pendidikan	Jabatan
1.	NY	50 tahun	SMA	Ketua
2.	SU	51 tahun	SMA	Sekretaris
3.	TY	52 tahun	Sarjana	Bendahara I
4.	EM	53 tahun	SMA	Bendahara II

Uraian tugas dari masing-masing pengurus dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Ketua bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan organisasi, memimpin rapat pengurus maupun umum serta membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan melalui kesepakatan rapat.
- 2) Sekretaris memiliki tanggung jawab atas setiap kegiatan dalam bidang administrasi, salah satunya membuat proposal pengajuan pinjaman.
- 3) Bendahara bertugas dalam pengelolaan keuangan yang meliputi keuangan kas, arisan, keuangan kelompok simpan pinjam, dan lain-lain. Serta mewakili kelompok menghadiri undangan UPK setiap 3 bulan sekali.

**c. Anggota Kelompok Al-Ikhlas**

Anggota kelompok Al-Ikhlas berjumlah 22 orang, namun yang menjadi anggota Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berjumlah 12 orang. Daftar anggota Simpan Pinjam Perempuan Kelompok Al-Ikhlas dapat dibaca pada tabel 5.

Tabel 5. Daftar Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Jam'iyah Al-Ikhlas

No.	Nama	Umur	Pekerjaan	Alamat
1.	NY	50	Pedagang	Gunungagung
2.	SU	51	Pedagang	Gunungagung
3.	EM	53	Pedagang	Gunungagung
4.	DR	35	Pedagang	Gunungagung
5.	SH	38	Pedagang	Gunungagung
6.	JE	40	Pedagang	Gunungagung
7.	JO	42	Pedagang	Gunungagung
8.	UN	60	Pedagang	Gunungagung
9.	SP	45	Pedagang	Gunungagung
10.	RH	39	Pedagang	Gunungagung
11.	SA	50	Pedagang	Gunungagung
12.	MU	35	Pedagang	Gunungagung

#### d. Program atau Kegiatan

Adapun program atau kegiatan dalam kelompok Jam'iyah Al-Ikhlas diantaranya:

- a. Pengajian, kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Jumat mulai pukul 14.00 dan dilaksanakan di rumah anggota jam'iyah secara bergiliran.
- b. Tausiyah setiap Jumat Pahing, kegiatan ini hampir sama dengan kegiatan pengajian namun kegiatan ini hanya dilakukan setiap Jumat Pahing dengan menghadirkan Ustadz/ Kiai dan ada tausiyah. Kegiatan dilaksanakan di Mushola Al-Ikhlas.
- c. Arisan, kegiatan arisan diikuti oleh anggota kelompok Jam'iyah Al-Ikhlas dilaksanakan setiap hari Jumat bersamaan dengan kegiatan pengajian selesai. Arisan dilaksanakan setelah kegiatan pengajian dan dilaksanakan di rumah anggota kelompok.
- d. Simpan pinjam, kelompok Jam'iyah Al-Ikhlas mengikuti program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah karena mayoritas



anggotanya merupakan pedagang kecil dan membutuhkan modal. Melalui musyawarah Kelompok Jam'iyah Al-Ikhlas berusaha mencari modal dagang yang lebih banyak dengan mencari lembaga yang bisa memberikan modal yaitu melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

### **3. Kepercayaan (*Trust*)**

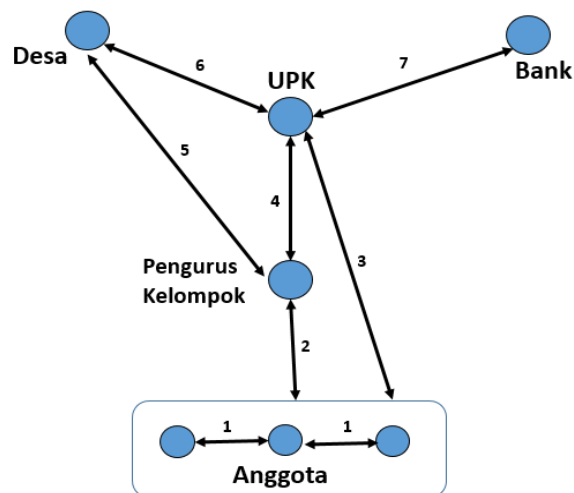
Keberhasilan suatu program dipengaruhi banyak faktor. Begitu pula keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Dari sekian banyak faktor, faktor kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting terhadap keberlangsungan program tersebut. Tanpa adanya rasa percaya akan sulit membangun kerjasama. Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka. Dengan adanya rasa saling percaya, tidak diperlukan kegiatan monitoring terhadap perilaku orang lain agar orang tersebut berperilaku sesuai dengan yang diinginkan.

Begitu pula dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang berpikir bahwa kepercayaan menjadi salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan program-programnya. Kepercayaan (*trust*) mempermudah membangun kerjasama dan berjalannya program.

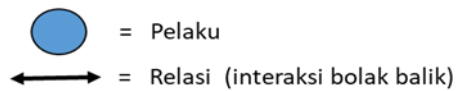
#### **a. Bentuk Relasi**

Kepercayaan (*trust*) yang bersifat timbal balik antara seluruh komponen *stakeholders* menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan *stakeholders* dan networking dalam mengatasi persoalan publik (*public affairs*) dan kepentingan publik (*public interest*).

Kepercayaan (*trust*) akan membentuk suatu relasi. Seperti dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa, dari adanya kepercayaan (*trust*) terbentuk suatu relasi. Kepercayaan (*trust*) yang terbangun dalam program tersebut membentuk relasi antar anggota kelompok, anggota dengan pengurus kelompok, anggota dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan desa, pengelola UPK dengan pihak bank, dan pengelola UPK dengan desa. Gambar bentuk relasi dapat dilihat pada gambar 3.



**Keterangan :**



Gambar 3. Bentuk Relasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kelompok Al-Ikhlas

- 1) Relasi yang terbangun antar anggota kelompok berupa hubungan yang terjalin karena satu kelompok jam'iyah. Kelompok tersebut melakukan komunikasi melalui kegiatan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Hal ini seperti yang disampaikan oleh EM yang merupakan salah satu anggota peminjam yang menyatakan:

“kalau hubungan dengan anggota kalau SPP itu sebenarnya kan sendiri-sendiri langsung ke pengurus, setor sendiri-sendiri. Hubungannya ya karena satu kelompok jam'iyah, di jam'iyah itu ada acara pengajian.”(CL XIII/ Minggu, 17 Juli 2016).

- 2) Relasi yang terbangun antara anggota dengan pengurus kelompok adalah pengurus kelompok sebagai seorang yang diwakilkan untuk memfasilitasi keperluan anggota yang berkaitan dengan simpan

pinjam UPK. Selain itu pengurus juga melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap anggota kelompok yang bermasalah, seperti telat membayar pinjaman. Seperti yang dikatakan oleh TY, selaku Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):

“jika ada peminjam tidak dapat setor di bulan itu, maka akan dibayarkan menggunakan uang kas sebesar setoran. Terus, setiap kali ada perguliran, ada pembinaan dari UPK dan pengurus kelompok tentang hak dan kewajiban peminjam. Haknya ya meminjam dan kewajibannya mengembalikan tepat waktu.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016).

- 3) Relasi yang terbentuk dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah adanya kerjasama dibidang simpan pinjam antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Relasi antara anggota dengan pengelola UPK adalah hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. UPK sebagai pihak yang memberikan pinjaman dan anggota sebagai peminjam. Dalam prosesnya, sebelum perguliran ada verifikasi dan pembinaan dari UPK. Selain itu, UPK juga memberikan sanksi kepada anggota peminjam yang bermasalah. Sanksi tersebut berupa anggota tersebut tidak diperbolehkan melakukan pinjaman di UPK lagi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh FS, selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) :

“di program simpan pinjam bentuk relasinya itu terjalinnya kerjasama. Seperti di program apapun kan pasti ada kerjasama. Cuma beda kerjasama dalam hal apa gitu. Kalau di simpan pinjam itu ya kerjasamanya dalam hal simpan pinjam. UPK

memberikan pinjaman dan masyarakat bisa meminjam di UPK.”(CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

TY selaku salah satu Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menambahkan:

“Bentuk relasi yang terjadi ya kerjasama antara UPK dan kelompok peminjam berupa kesepakatan simpan pinjam yang didalamnya itu sudah ada aturan simpan pinjam. Ada komunikasi juga, jadi sebelum perguliran itu ada verifikasi dari tim verifikasi UPK untuk mencocokkan data dan kenyataan di lapangan, ada pembinaan juga *kan*, disitu *kan* ada tanya jawab juga.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

- 4) Relasi antara pengurus dan pengelola UPK adalah pengurus kelompok sebagai pihak yang mewakili kelompok peminjam dalam berhubungan langsung dengan pengelola UPK. Pengurus juga mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh UPK, seperti kegiatan yang berkaitan dengan administrasi. Seperti yang disampaikan oleh TY selaku salah satu Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):

“hubungan pengurus dengan pengelola UPK itu, yang berhubungan langsung dengan UPK *kan* sebenarnya pengurus. Jadi pengurus itu mewakili kelompok dalam berhubungan langsung dengan UPK. Kalau ada kegiatan dari UPK, pengurus mewakili untuk ikut kegiatannya, misalnya kegiatan yang berhubungan dengan administrasi.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

- 5) Relasi antara pengurus dengan desa yaitu pada saat pengajuan pinjaman diperlukan persetujuan dari kepala desa. Selain itu pengurus mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh desa yang berkaitan dengan usulan tiap kelompok. Seperti penuturan SU selaku sekretaris kelompok Al-Ikhlas yang menyatakan:

“kalau hubungan dengan desa itu cuma minta tanda tangan ke Kades untuk persetujuan pengajuan pinjaman yang mau diusulkan. Sebelum pengajuan kan kami bikin proposal pengajuan pinjaman lalu minta persetujuan di Kepala Desa.” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

- 6) Relasi antara UPK dengan desa adalah dalam kegiatan musrembang yang dilaksanakan di desa dihadiri oleh UPK untuk memberikan pembinaan dan pemberian informasi yang berkaitan dengan PNPM. Hal ini disampaikan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“di desa itu kan ada musrembang, disitu UPK juga hadir di musrembang untuk memberikan sosialisasi dan pemberian informasi yang berkaitan dengan PNPM, program-program PNPM.”(CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

- 7) Relasi antara pengelola UPK dengan bank adalah UPK bekerjasama dengan bank terkait dengan menyimpan dan menarik dana simpan pinjam yang akan digunakan untuk pemenuhan pinjaman kelompok. Hal ini dituturkan oleh NF selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK): “kerjasama dengan bank itu ya terkait dengan menyimpan dan menarik dana simpan pinjam untuk program SPP, Mbak.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk relasi yang terjadi dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah terbentuknya kerjasama dalam hal simpan pinjam antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam.

Kepercayaan (*trust*) yang terbangun dalam program tersebut membentuk relasi antar anggota kelompok, anggota dengan pengurus kelompok, anggota dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan desa, pengelola UPK dengan pihak bank, dan dan pengelola UPK dengan desa. Selain itu ada juga terjalin komunikasi mengenai kesepakatan simpan pinjam melalui tanya jawab antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam pada saat verifikasi dan pembinaan.

**b. Fungsi Kepercayaan (*Trust*)**

Membangun kepercayaan (*trust*) pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Hal itu tergantung pada perilaku dan kemampuan kita agar orang lain dapat percaya pada kita dan juga berarti seseorang rela mengambil resiko dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting dalam membangun dan mengembangkan hubungan jangka panjang antar individu maupun antar organisasi.

Kepercayaan (*trust*) penting agar dapat menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain. Selain itu, adanya kepercayaan (*trust*) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi maupun program yang dijalankan. Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka.

Begitu pun dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang melaksanakan program-programnya dengan berlandaskan pada kepercayaan. Kepercayaan (*trust*) menjadi salah faktor penting bagi keberlangsungan program yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berjalan dengan lancar hingga saat ini karena terjalin kepercayaan antara pengelola dan anggota kelompok. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) , yang menyatakan: “fungsi kepercayaan dalam program ini ya sebagai landasan kita untuk menjalin hubungan kerjasama. Agar kerjasama terjalin dengan baik ya harus ada rasa saling percaya.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Penuturan lain disampaikan oleh TY yang merupakan Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) menyampaikan:

“adanya kepercayaan ya supaya hubungan antara pengurus UPK dengan peminjam terjalin dengan baik, apalagi ini kan simpan pinjam ya harus saling percaya, saling menjaga jadi kan kalau ada masalah bisa diselesaikan baik-baik. Ya damai *gitu lah*.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Sedikit berbeda dengan FS dan TY, NF sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menambahkan fungsi kepercayaan sebagai berikut:

“disini kan programnya simpan pinjam apalagi tidak ada jaminan, jadi tentunya perlu kepercayaan dari dua pihak. Kepercayaan ya sebagai dasar kita, pegangan kita dalam hubungan simpan pinjam. Bisa dikatakan kalau saling percaya ya bisa mengurangi konflik, karena kan kalau saling percaya masing-masing bisa saling menjaga hubungan.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)



Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah sebagai landasan atau dasar dalam menjalin hubungan kerjasama antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam. Selain itu kepercayaan berfungsi dalam mengurangi konflik yang terjadi dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga bisa tercipta kedamaian. Adanya kepercayaan untuk menjalin silaturahmi dan komunikasi agar hubungan antara pengurus UPK dengan peminjam terjalin dengan baik, sehingga apabila terjadi masalah dapat diselesaikan dengan baik.

**c. Wujud Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan merupakan salah satu hal mendasar yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan antar individu atau kelompok. Hubungan yang didasari rasa percaya akan memperkuat hubungan yang terjalin. Kepercayaan masing-masing pihak akan membentuk suatu relasi berupa hubungan kerjasama.

Begitu pula dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang menjalin hubungan kerjasama dengan didasari dengan rasa saling percaya masing-masing pihak, yaitu antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun wujud kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan

di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini adalah kemudahan dalam peminjaman. Kemudahan peminjaman dalam program tersebut adalah karena tidak diperlukan jaminan dalam meminjam. Seperti yang dituturkan oleh TY, selaku Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):

“Kelompok peminjam bisa meminjam tanpa jaminan, jadi hanya berdasarkan rekomendasi dari bendahara kelompok peminjam. Syarat pinjamannya hanya dengan fotocopy KTP.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Hal ini diperkuat dengan yang disampaikan oleh NF, selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“kalau wujudnya, dalam bentuk realisasinya di SPP ini bisa meminjam tanpa jaminan. Kalau mau pinjam syaratnya cuma fotocopy KTP. Bisa dibilang kalau fotocopy KTP secara nominal itu kan tidak berharga, Mbak. Ya itu mungkin salah satu wujud kepercayaan ya.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Penuturan senada disampaikan oleh FS, selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK): “wujudnya mungkin kalau pinjaman di SPP ini tidak ada jaminan. Tidak ada syarat khusus, Cuma fotocopy KTP.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Penuturan senada juga ditambahkan oleh SU yang merupakan salah satu pengurus kelompok:

“kalo mau mengajukan pinjaman disini mudah mbak, jadi kami hanya melampirkan fotocopy KTP saja. Mungkin dengan jaminan yang mudah sehingga sangat diperlukannya rasa saling percaya” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa dalam

hubungan kerjasama antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) didasari dengan adanya kepercayaan. Adapun wujud kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah kemudahan pinjaman berupa pinjaman tanpa adanya jaminan, hanya dengan fotocopy KTP.

**d. Manfaat Kepercayaan (*Trust*)**

Program pemberdayaan perempuan yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa mempunyai manfaat yang dirasakan anggota kelompoknya dan warga sekitar, terutama dari segi ekonomi. Dari segi ekonomi program tersebut dapat meningkatkan pendapatan. Selain itu adanya program yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa juga berpengaruh pada keterlibatan kaum perempuan dalam program pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting dalam membangun dan mengembangkan hubungan jangka panjang antar individu maupun antar organisasi. Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membangun kepercayaan (*trust*) agar dapat menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain. Selain itu, kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting bagi keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi maupun program yang dijalankan.

Begitu pula dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang berpikir bahwa kepercayaan menjadi salah satu faktor yang penting dalam melaksanakan program-programnya. Kepercayaan (*trust*) menjadi salah faktor penting bagi keberlangsungan program yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berjalan dengan lancar hingga saat ini karena terjalin kepercayaan antara pengelola dan anggota kelompok. Hal tersebut ditunjukkan dengan pernyataan FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang menyatakan:

“manfaat yang diperoleh dari adanya kepercayaannya ya kegiatan simpan pinjam jadi semakin bagus dan kelompok bisa menambah modal dengan pinjaman dengan jasa lunak atau tanpa jaminan.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Manfaat lain ditambahkan oleh NF, selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa:

“jelasnya adanya kepercayaan membuat rasa kekeluargaannya itu lebih erat karena memang disini kan meminjamkan tanpa jaminan, tapi UPK tetap memperlakukan dengan baik, dan juga adanya rasa saling percaya itu menjadikan programnya berjalan lancar sampai sekarang.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

TY selaku Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) juga menambahkan manfaat kepercayaan dalam program ini yaitu:

“manfaatnya ya programnya jadi berhasil mungkin ya, buktinya yang paling kelihatan ya programnya masih bisa berjalan sampai sekarang ya, Mbak. Jadinya kan dengan berjalannya program ini bisa membantu masyarakat miskin terutama buat perempuan, dan juga enakunya itu kalo disini bisa pinjam tapi tidak ada jaminannya.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di UPK Kecamatan Bumijawa yaitu dengan adanya kepercayaan rasa kekeluargaan menjadi semakin erat. Selain itu, adanya kepercayaan bermanfaat bagi keberhasilan program di UPK Kecamatan Bumijawa yang dapat dilihat dari keberlangsungan program yang berjalan hingga saat ini.

Kepercayaan (*trust*) juga bermanfaat terhadap terbentuknya kerjasama antar individu atau kelompok. Dalam hal ini kerjasama yang terjadi adalah antara pengelola dan anggota kelompok program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kepercayaan (*trust*) mempermudah membangun kerjasama dan berjalannya program. Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang terjadi diantara mereka. Keberlangsungan program ini terjadi karena adanya rasa saling percaya sehingga terjadi suatu kerjasama. Hal tersebut seperti yang dituturkan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) :

“Manfaat kepercayaan terhadap kerjasama ya pastinya dengan adanya kepercayaan memungkinkan adanya kerjasama. Kerjasamanya ya dalam bentuk simpan pinjam itu. *Nah* dari kerjasama itu kan nantinya ada manfaat yang diperoleh. Kelompok peminjam bisa dapat pinjaman dan program di UPK bisa berlanjut.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Penuturan lain disampaikan oleh NF selaku sekretaris Unit

Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyatakan:

“Pastinya bermanfaat ya terhadap kerjasama. Kalau tidak percaya kan susah ya kalau mau kerjasama. Apalagi kan kita tidak kenal langsung orangnya. Tidak tahu orangnya seperti apa. Baik tidak, tanggungjawab tidak. Kalau tidak percaya ya sulit *gitu*. Apalagi ini simpan pinjam, tapi simpan pinjam disini kan tanpa jaminan ya Mbak, jadi ya bisa jadi alternatif untuk membantu memberikan pinjaman dengan jasa lunak. Ya istilahnya memudahkan, terutama untuk kaum perempuan.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Pendapat lain ditambahkan oleh TY selaku salah satu pengurus

kelompok peminjam yang menyampaikan:

“kalau manfaatnya terhadap kerjasama ya antara UPK dan peminjam dapat bekerjasama yang saling menguntungkan karena si peminjam bisa mendapatkan pinjaman dengan jasa lunak dan program UPK dapat berjalan terus dan semakin berkembang.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

SU yang merupakan salah satu pengurus kelompok juga menyampaikan pendapat serupa: “sangat bermanfaat mbak, karena dengan adanya saling percaya maka dapat terjalin kerjasama yang baik antara peminjam dan pihak UPK.” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepercayaan (*trust*) bermanfaat terhadap terjalinnya kerjasama dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

Kecamatan Bumijawa. Adanya kepercayaan dalam program tersebut memungkinkan terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam. Kerjasama tersebut berupa peminjam yang bisa memperoleh pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dari kerjasama tersebut juga berpengaruh pada keberlangsungan dan berkembangnya program di Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Kepercayaan (*trust*) bermanfaat pula terhadap komitmen. Komitmen menjadi komponen penting dalam membangun suatu hubungan dengan individu atau kelompok lain. Namun komitmen juga merupakan suatu hal yang mudah hilang apabila pihak-pihak yang berhubungan tidak saling percaya. Rasa saling percaya dari pihak masing-masing akan menumbuhkan komitmen yang akan mempertahankan atau memelihara hubungan yang dibangun. Seperti yang disampaikan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyatakan:

“manfaatnya terhadap komitmen itu ya dari adanya kepercayaan bisa menumbuhkan komitmen masing-masing pihak, yaitu UPK dan kelompok peminjam. Komitmen masing-masing harus dijaga dengan cara UPK dan si peminjam saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam simpan pinjam.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Sejalan dengan FS, NF selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menuturkan:

“ya tentu ada manfaatnya terhadap komitmen ya, Mbak. Komitmen itu kan ada karena saling percaya. Komitmen yang bagaimana, komitmennya itu ya UPK dan kelompok peminjam saling memenuhi kewajiban masing-masing. UPK kewajibannya

ya memberi pelayanan yang baik bagi si peminjam. *Nah* si peminjam kewajibannya ya tanggung jawab terhadap aturan yang sudah disepakati dalam simpan pinjam.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Begitu pula penuturan TY selaku bendahara kelompok peminjam yang menyampaikan:

“terhadap komitmen pasti ada manfaatnya. Komitmennya itu berupa kelompok peminjam memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan simpan pinjam dari UPK dan UPK juga memberikan pelayanan yang baik kepada kelompok peminjam. Dengan begitu kan saling menjaga komitmen masing-masing agar bisa saling percaya.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

SU yang merupakan salah satu pengurus kelompok juga menyampaikan pendapat serupa:

“ya pasti ada manfaatnya terhadap komitmen mbak, dengan adanya komitmen maka komunikasi dengan UPK pasti berjalan dengan baik. Saya berkewajiban untuk membayar cicilan dan UPK juga memberikan pelayanan yang ramah, sopan dan baik mbak.” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya kepercayaan (*trust*) terhadap komitmen dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini adalah dari adanya kepercayaan dalam program tersebut dapat menumbuhkan komitmen yang dapat dijaga dan dipertahankan dengan cara antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam harus saling memenuhi kewajiban masing-masing. Kewajiban kelompok peminjam berupa kesadaran dan tanggung jawab peminjam dalam memenuhi aturan yang telah disepakati dalam simpan



pinjam. Sedangkan kewajiban Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada kelompok peminjam.

Selain bermanfaat terhadap terbentuknya kerjasama dan komitmen, kepercayaan (*trust*) juga berpengaruh terhadap lamanya hubungan yang terjalin. Hubungan yang terjalin dalam jangka lama bisa dipertahankan salah satunya dengan adanya kepercayaan dari masing-masing pihak. Kepercayaan memungkinkan pihak-pihak tersebut akan menjalin kerjasama lagi di masa mendatang. Seperti halnya penuturan FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“iya terhadap lamanya hubungan juga. Kepercayaan juga kan menghasilkan kerjasama. Dari *situ kan* nanti bisa terjadi berapa lama kerjasama yang terjadi. Kalau saling percaya ya bisa saja kerjasama dalam waktu yang lama, atau nanti bisa kerjasama lagi di program simpan pinjam.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Pernyataan senada juga disampaikan oleh NF selaku sekretaris

Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“iya itu berarti menyangkut ke lamanya hubungan kerjasama juga ya? Kepercayaan itu memang pengaruh sekali ya ke lamanya hubungan kerjasama. Seperti yang tadi saya *bilang* kerjasama kalau tidak percaya kan susah, apalagi tidak kenal orangnya. *Nah* kalau sudah ada kerjasama kan nanti bisa dilihat ke depannya nanti kerjasamanya bisa berlanjut atau tidak, bisa berapa lama menjalin kerjasama.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Hal serupa juga dituturkan oleh TY yang merupakan salah satu bendahara kelompok peminjam:

“kalau itu mungkin ini ya, UPK itu mempunyai program tiap semester untuk mengadakan sosialisasi program simpan pinjam dengan tujuan agar terjalin hubungan kerjasama untuk menumbuhkan kepercayaan kelompok peminjam terhadap UPK.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Pendapat serupa disampaikan oleh SU yang merupakan salah satu pengurus kelompok:

“iya mbak kepercayaan sangat berpengaruh bagi lamanya hubungan, semenjak ada program simpan pinjam ini di bentuk saya selalu meminjam di sini mbak sampai sekarang, ya karena disini proses peminjamannya tidak terlalu dipersulit” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya kepercayaan (*trust*) terhadap lamanya hubungan yang terjadi dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini adalah dari adanya kepercayaan dalam program tersebut dapat terbentuk kerjasama yang dapat menentukan lamanya hubungan kerjasama yang terjalin antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam. Selain itu ada program sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan tujuan agar terjalin kerjasama dan menumbuhkan kepercayaan kelompok peminjam kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

Kepercayaan (*trust*) juga bermanfaat terhadap kualitas program maupun kualitas hubungan yang terjalin. Kualitas akan berpengaruh terhadap pilihan seseorang terhadap suatu program. Pihak yang percaya lebih mungkin untuk menerima dan mengikuti program dari pihak yang dipercaya, yang nantinya dapat memperoleh manfaat yang lebih besar dari program tersebut.

Begitu juga dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang hingga saat ini dipercaya oleh masyarakat untuk mengikuti program yang diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Program tersebut dapat berjalan dengan lancar hingga saat ini karena terjalin kepercayaan antara pengelola dan anggota kelompok. Hal tersebut seperti yang ditunjukkan dengan pernyataan FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK), yang menyatakan:

“rasa saling percaya juga bisa meningkatkan kualitas program. Dengan pelayanan yang baik, UPK bisa dipercaya oleh masyarakat. Program UPK yang dipercaya juga meningkatkan kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus kan masyarakat bisa mengikuti program UPK yang bisa membantu masyarakat juga dan program UPK juga bisa terus berlanjut.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

NF, selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa menuturkan hal yang tidak jauh berbeda dengan FS, yaitu:

“begini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, program SPP itu kan bisa meminjam tanpa jaminan ya, Cuma fotocopy KTP. Jadi bisa dibilang mudah kalau meminjam di UPK. Tapi walaupun dari kami dari UPK tidak ada jaminan, kami tetap melayani si peminjam dengan baik. Programnya bisa berjalan sampai saat ini berarti kan karena dipercaya sebagai program yang bisa membantu masyarakat. Istilahnya programnya berhasil karena dipercaya begitu. Jadi, mungkin programnya berhasil karena kualitasnya.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Penuturan yang senada juga disampaikan oleh TY, selaku salah satu pengurus kelompok:

“Kelompok peminjam sudah merasakan manfaat dari program UPK. Walaupun di UPK bisa meminjam tanpa jaminan tapi jasa dan pelayanan yang diberikan pengelola UPK kepada peminjam

itu sangat baik sehingga peminjam lebih memilih meminjam di UPK.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa manfaat adanya kepercayaan (*trust*) terhadap kualitas dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini adalah dari adanya kepercayaan dalam program tersebut dapat meningkatkan kualitas program yang berpengaruh terhadap keberlangsungan program tersebut.

**e. Tindakan Membangun Kepercayaan (*Trust*)**

Perilaku nyata dari dua individu yang terlibat dalam suatu hubungan adalah penting untuk mengetahui apakah kepercayaan dapat dibangun dalam hubungan itu atau tidak. Sebuah kepercayaan dapat meningkatkan dan merangsang hubungan organisasi dan membimbing perilaku yang akan membantu dalam membangun kepercayaan. Kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting dalam membangun dan mengembangkan hubungan jangka panjang antar individu maupun antar organisasi. Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membangun kepercayaan (*trust*) agar dapat menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain.

Membangun kepercayaan menjadi hal penting agar suatu hubungan dapat berjalan lama karena membangun kepercayaan pada orang lain bukan hal yang mudah. Hal itu tergantung pada perilaku dan kemampuan kita agar orang lain dapat percaya pada kita dan juga

berarti seseorang rela mengambil resiko dalam sebuah hubungan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh NF selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“membangunnya UPK melayani dengan baik, dan peminjam juga harus mempunyai tanggung jawab, tanggung jawabnya dengan menyetor tepat waktu atau tanggalnya. Jadi kan saling percaya.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Penuturan serupa juga disampaikan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“membangunnya ya dengan cara antara pengelola UPK dan kelompok peminjam harus saling bersinergi. Pengelola melayani dengan baik, sementara kelompok peminjam juga harus mempunyai tanggung jawab, tanggung jawabnya itu misalnya menyetor tepat waktu atau tanggalnya.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Sejalan dengan yang dituturkan NF dan FS, TY selaku salah satu pengurus kelompok juga menuturkan hal yang sama, yaitu:

“cara membangunnya itu yang pasti dari pelayanan yang baik dari UPK ya, Mbak. Kalau UPK melayani dengan baik kan anggota kelompok juga enak ya, Mbak. Tapi anggota kelompok juga harus baik, maksudnya anggota juga harus setor tepat waktu, tidak menunggak, ya disiplin *gitu lah*, Mbak. Jadi ya ibaratnya harus saling membantu harus saling menjaga, harus saling mematuhi hak dan kewajiban masing-masing antara pengurus dan anggotanya.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Serupa dengan yang disampaikan yang lain, SU selaku salah satu pengurus kelompok juga menuturkan hal yang sama, yaitu:

“ya dari pihak UPKnya dulu mbak dengan memberikan pelayanan yang baik, begitu juga dengan anggota mbak harus tepat waktu dalam menyetorkan kewajibannya. Jadi antara kedua pihak tersebut berjalan timbal balik lah mbak.” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa cara membangun kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah dengan antara pengelola dan kelompok peminjam harus saling bersinergi dan saling mematuhi hak dan kewajiban masing-masing antar pengelola dan kelompok peminjam. Adapun hal itu dilakukan dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) memberikan pelayanan yang baik dan kelompok peminjam bertanggungjawab mengembalikan pinjaman tepat waktu.

Membangun kepercayaan harus pula disertai sikap terbuka masing-masing pihak yang berhubungan. Sikap terbuka dalam hubungan akan memudahkan seseorang percaya dan menjalin kerjasama. Begitu pula dalam dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang juga menerapkan sikap terbuka dalam pelaksanaan program agar bisa terjalin rasa saling percaya antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam. Seperti penuturan NF selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagai berikut:

“iya ada pastinya. Saling terbuka juga penting ya Mbak. Disini kan kita bisa dibilang bekerjasama. Kalau bekerjasama tentunya harus ada keterbukaan dari masing-masing. Terbuka yang bagaimana, dari kita pengelola terbuka dalam memberikan informasi yang benar tentang SPP. Tentang aturan-aturan dalam

SPP, hak dan kewajiban masing-masing. Kurang lebih seperti itu.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Pendapat lain ditambahkan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola

Kegiatan (UPK) yang menyampaikan:

“tentu saja harus saling terbuka. Keterbukaan sangat penting untuk membangun kepercayaan. Bagaimana kita mau bekerjasama kalau tidak saling terbuka, tentunya kepercayaan akan sulit terwujud.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

TY selaku salah satu pengurus kelompok juga menuturkan sebagai berikut:

“iya pasti ada. Memang harus saling terbuka ya. Kalau saling terbuka *kan* bisa saling percaya ya. Kita sebagai peminjam juga harus terbuka dalam memberikan informasi. Apalagi saya sebagai bendahara kelompok yang merekomendasikan peminjam. Saya harus terbuka mengenai informasi si peminjam. Supaya UPK bisa mempertimbangkan.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Sependapat dengan yang lain, SU selaku salah satu pengurus kelompok juga menuturkan hal yang sama, yaitu:

“ya memang diwajibkan untuk saling terbuka mbak karena dengan adanya keterbukaan antara anggota dengan UPK *kan* pasti dapat terjalin kepercayaan mbak.” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya sikap terbuka dalam membangun kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa sangat penting. Sikap terbuka akan memudahkan dalam menjalin kerjasama antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam. Adapun sikap terbuka dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan memberikan informasi yang benar

mengenai program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kelompok peminjam memberikan informasi yang benar mengenai anggota kelompok peminjam.

Suatu program pasti mempunyai harapan bersama yang ingin dicapai. Adanya harapan akan meningkatkan kesadaran masing-masing untuk mematuhi hak dan kewajibannya agar harapan bersama dapat terwujud. Begitu pula dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bunijawa yang didalamnya terdapat harapan. Pengelola dan kelompok peminjam mempunyai harapan bersama yang ingin dicapai. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh TY selaku salah satu pengurus kelompok peminjam:

“kalau harapannya kami ikut SPP kan supaya lebih sejahtera hidupnya. Kami kan inginnya harapan itu bisa terwujud. Jadi ya harus saling percaya dengan saling mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Pendapat lain disampaikan oleh NF, selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang mengatakan:

“SPP itu mempunyai tujuan agar masyarakat miskin terutama perempuan bisa lebih berdaya dan lebih sejahtera. Itu tujuan yang ingin dicapai. Harapannya ya agar tujuan itu bisa tercapai. Harapan bisa terwujud kalau kita saling percaya. Dengan saling percaya masing-masing bisa punya kesadaran untuk bekerjasama dengan baik.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Penuturan lain ditambahkan oleh FS, selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yang menyampaikan sebagai berikut:

“dalam program SPP tentu ada harapan yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkannya perlu adanya kepercayaan. Kepercayaan



yang seperti apa? Pengelola dan si peminjam harus saling mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi masing-masing.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas maka dapat disimpulkan bahwa adanya harapan bersama dalam membangun kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa sangat berpengaruh. Adanya harapan yang ingin dicapai mempengaruhi sikap pihak-pihak yang bekerjasama agar terjalin kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik akan terwujud apabila masing-masing mematuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan begitu harapan bisa terwujud.

#### **4. Faktor Pendukung Pembentuk Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan (*trust*) memang bukan suatu hal yang mudah dibangun. Membangun kepercayaan (*trust*) tidak bisa hanya dari salah satu sumber saja, tetapi harus dari dua atau lebih pihak. Begitu pula dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang saling membangun kepercayaan (*trust*) dengan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam membangun kepercayaan (*trust*) diantara pihak-pihak tersebut, terdapat faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepercayaan (*trust*). Faktor pendukung tersebut dapat timbul dari internal maupun eksternal.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa:

“faktor yang mendukung ya, kalau dari UPK dengan memberikan pelayanan yang bagus, memberikan informasi yang benar. Kalau dari peminjam dengan administrasi kelompoknya yang baik. Kalau baik kan artinya tanggung jawab, disiplin. Jadi dari pengelolanya ya bisa percaya kalau mau meminjam lagi. Faktor lainnya ya paling dari desa ada musrembang, UPK bisa memberikan sosialisasi dan informasi yang berkaitan dengan SPP atau PNPM.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Sedikit berbeda dengan yang disampaikan FS, NF selaku sekretaris

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menuturkan pernyataan berikut:

“iya ada. Jelasnya secara internal ya, Mbak. Kalau menurut saya, disikap itu memang betul-betul mempengaruhi. Karena memang pendekatannya itu memang harus betul-betul hati-hati, misalnya kalau ada tunggakan tidak bisa secara frontal, itu tidak bisa. Kalau ada tunggakan, kalau terlalu menekan nanti malah tidak bayar setoran, karena tidak ada jaminan kan. Tapi kalau terlalu lembek juga disepelekan. Pendekatannya ya disesuaikan, Mbak. Biasanya juga melibatkan tokoh masyarakat sekitar, khususnya pak lurah untuk mengatasi kelompok yang bandel istilahnya. Ada keterlibatan dari masing-masing unsur.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Penuturan lain ditambahkan oleh TY selaku salah satu pengurus

kelompok peminjam:

“kalau faktor pendukung memang yang paling terlihat itu dari internal, sikap. Kami peminjam merasakan pengelola memang melayani kami dengan baik, informasi yang diberikan juga benar, jujur. Saya juga pribadi kenal dengan pengelola memang baik. Kalau dari kami dengan setor tepat waktu, tidak melebihi tanggal maksimal. Selain itu mungkin dari administrasi kelompoknya, dari kelompok peminjam ada buku administrasi antara lain buku peminjaman, kartu pinjaman buku tamu, buku serah terima pinjaman, buku setoran buku daftar pengurus.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

MT selaku salah satu pengelola UPK juga menambahkan:

“faktor yang mendukung kalo dari UPK ya pasti pada pelayanan karena kita kan melayani. Kalau yang lain bisa dari desa termasuk mendukung dengan pihak UPK bisa memberikan sosialisasi tentang SPP, selain itu juga kan ada bank yang memudahkan kita untuk menyimpan dan menarik dana SPP” (CL X/ Sabtu, 2 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari empat narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah dari faktor internal dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pengurus kelompok dan anggota kelompok dan eksternal dari desa dan pihak bank. Faktor internal dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah adanya pelayanan yang baik dan pemberian informasi yang benar mengenai program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dari pengurus kelompok dengan administrasi kelompok yang baik serta tanggung jawab, dan dari anggota kelompok mayoritas anggota sudah disiplin dan tanggung jawab dalam menyetor pinjaman. Sedangkan faktor eksternal dari desa adalah desa memfasilitasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mensosialisasikan program dan membantu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengatasi kelompok yang bermasalah, serta dari pihak bank memberikan kemudahan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyimpan dan menarik dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

#### **5. Faktor Penghambat Pembentuk Kepercayaan (*Trust*)**

Membangun kepercayaan (*trust*) antar pihak bukanlah hal yang mudah. Begitu pula membangun kepercayaan (*trust*) antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dengan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mana terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam terbentuknya kepercayaan (*trust*) diantara pihak-pihak

tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Adapun faktor yang dapat menghambat terbentuknya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan merupakan faktor internal, diantaranya sikap kurang disiplin dan kurang bertanggung jawab dari anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK): “kalau yang menghambat itu, masih banyak kelompok yang kurang memahami administrasi, jadinya sedikit menghambat dalam membangun rasa percayanya itu.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

NF selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sendiri menyampaikan bahwa:

“faktor yang menghambatnya itu sama secara internal dari sikap juga. Masyarakatnya yang bandel sering menyepelekan karena tidak ada jaminan kan, cuma fotocopy KTP. Buktinya ada kelompok yang dari awal meminjam masih menunggu sampai sekarang. Berarti itu kan salah satu karakter ya, karakter masyarakat yang tidak mempedulikan dan kurang tanggung jawab.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Selain itu, TY yang merupakan salah satu pengurus kelompok peminjam juga menuturkan:

“kalau faktor penghambatnya itu rata-rata kelompok peminjam mayoritas pendidikannya rendah, maka rasa tanggung jawabnya kurang. Mereka kurang memahami aturan peminjaman yang disampaikan pengelola UPK. Kadang-kadang ada peminjam yang tidak tepat waktu membayar dengan alasan belum punya uang dan minta dibayari dulu.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari narasumber di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) adalah dari faktor internal yaitu masih ada

anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman yang disebabkan pendapatan yang tidak tentu dan rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta kurangnya pemahaman tentang administrasi.

Adanya faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) perlu diatasi agar program berjalan dengan baik. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut adalah seperti yang dikatakan oleh TY, selaku Bendahara kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP):

“jika ada peminjam tidak dapat setor di bulan itu, maka akan dibayarkan menggunakan uang kas sebesar setoran. Terus, setiap kali ada perguliran, ada pembinaan dari UPK dan pengurus kelompok tentang hak dan kewajiban peminjam. Haknya ya meminjam dan kewajibannya mengembalikan tepat waktu.” (CL XI/ Minggu, 3 Juli 2016)

Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan FS selaku Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK):

“solusinya ya dengan saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Di pembinaan biasanya diingatkan lagi hak dan kewajiban.” (CL IV/ Senin, 6 Juli 2016)

Tidak jauh berbeda dengan FS, NF selaku sekretaris Unit Pengelola Kegiatan (UPK) menambahkan:

“mengatasinya ya dengan diingatkan. Biasanya kalau perguliran dana itu ada pembinaan. Di pembinaan itu nanti kembali dijelaskan hak dan kewajiban. Kalau di peminjam kan haknya memperoleh pinjaman dan kewajibannya setor tepat waktu, tidak telat. Sebaliknya dari UPK ya haknya menerima setoran tepat waktu, tidak nunggak. Nah kewajibannya memberikan pinjaman pada si peminjam, memberikan pelayanan yang baik.” (CL VI/ Senin, 20 Juli 2016)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dari tiga narasumber tersebut maka dapat disimpulkan bahwa solusi dalam

mengatasi hambatan membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## **B. Pembahasan**

### **1. Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan sebagai produk dari modal sosial ini menjadi landasan dalam hubungan antar manusia. Dalam membangun suatu hubungan antar manusia dilandasi adanya rasa saling percaya yang didasari perasaan yakin bahwa ada perasaan aman dalam berinteraksi dengan orang lain atau keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut akan memenuhi segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan.. Dengan adanya kepercayaan, dapat menumbuhkan harapan yang sesuai dengan norma-norma yang dianut bersama sehingga mewujudkan langgengnya hubungan kerjasama dalam masyarakat.

*Trust* didefinisikan oleh Fukuyama (2010) sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, dan perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama oleh anggota-anggota komunitas itu.

Kepercayaan timbul karena adanya suatu rasa percaya kepada pihak lain yang memang mempunyai kualitas yang dapat mengikat dirinya,

seperti tindakannya yang konsisten, kompeten, jujur, adil, bertanggung jawab, suka membantu dan rendah hati.

**a. Bentuk Relasi**

Dedi Darmawan (2008: 436) menyampaikan, kepercayaan (*trust*) yang bersifat timbal balik antara seluruh komponen *stakeholders* menjadi modal yang penting dalam menumbuhkan partisipasi, kerjasama, bahkan kemitraan *stakeholders* dan networking dalam mengatasi persoalan publik (*public affairs*) dan kepentingan publik (*public interest*).

Data hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa bentuk relasi yang terjadi dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah terbentuknya kerjasama dalam hal simpan pinjam antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam. Kepercayaan (*trust*) yang terbangun dalam program tersebut membentuk relasi antar anggota kelompok, anggota dengan pengurus kelompok, anggota dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan desa, pengelola UPK dengan pihak bank, dan dan pengelola UPK dengan desa. Selain itu ada juga terjalin komunikasi mengenai kesepakatan simpan pinjam melalui tanya jawab antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam pada saat verifikasi dan pembinaan.

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa terbentuk relasi antar anggota kelompok, anggota dengan pengurus kelompok, anggota dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan pengelola UPK, pengurus kelompok dengan desa, pengelola UPK dengan pihak bank, dan dan pengelola UPK dengan desa. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa didasari dari kepercayaan masing-masing pihak, yaitu berupa kerjasama dan komunikasi. Kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa membentuk kerjasama dalam hal simpan pinjam antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam. Selain itu ada juga terjalin komunikasi mengenai kesepakatan simpan pinjam melalui tanya jawab antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam pada saat verifikasi dan pembinaan.

**b. Fungsi Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan (*trust*) penting agar dapat menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain. Selain itu, adanya kepercayaan (*trust*) juga berpengaruh terhadap keberlangsungan dan keberhasilan suatu organisasi maupun program yang dijalankan. Rasa percaya akan mempermudah terbentuknya kerjasama. Semakin kuat rasa percaya pada orang lain maka semakin kuat juga kerjasama yang



terjadi diantara mereka. Begitu pun dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang melaksanakan program-programnya dengan berlandaskan pada kepercayaan. Kepercayaan (*trust*) menjadi salah faktor penting bagi keberlangsungan program yang dijalankan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berjalan dengan lancar hingga saat ini karena terjalin kepercayaan antara pengelola dan anggota kelompok.

Mollering menjelaskan, terdapat enam fungsi penting kepercayaan (*trust*) dalam hubungan-hubungan sosial kemasyarakatan (dalam Arya Hadi Dharmawan, 2002: 4). Keenam fungsi tersebut adalah:

- 1) Kepercayaan dalam arti *confidence*
- 2) Kerjasama
- 3) Penyederhanaan pekerjaan
- 4) Ketertiban
- 5) Pemelihara kohesivitas sosial
- 6) Modal sosial

Data hasil penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa menunjukkan bahwa fungsi dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah sebagai

landasan atau dasar dalam menjalin hubungan kerjasama antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam. Selain itu kepercayaan berfungsi dalam mengurangi konflik yang terjadi dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sehingga bisa tercipta kedamaian.

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti, yang kemudian dilakukan perbandingan terhadap teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa fungsi kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa sesuai dengan fungsi kepercayaan (*trust*) yang dikemukakan oleh para ahli.

### **c. Wujud Kepercayaan (*Trust*)**

Kepercayaan merupakan salah satu hal mendasar yang sangat penting dalam membangun sebuah hubungan antar individu atau kelompok. Hubungan yang didasari rasa percaya akan memperkuat hubungan yang terjalin. Kepercayaan masing-masing pihak akan membentuk suatu relasi berupa hubungan kerjasama. Begitu pula dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang menjalin hubungan kerjasama dengan didasari dengan rasa saling percaya masing-masing pihak, yaitu antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun wujud kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini adalah kemudahan

dalam peminjaman. Kemudahan peminjaman dalam program tersebut adalah karena tidak diperlukan jaminan dalam meminjam.

Data hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa dalam hubungan kerjasama antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdapat adanya kepercayaan. Adapun wujud kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah kemudahan pinjaman berupa pinjaman tanpa adanya jaminan, hanya dengan fotocopy KTP.

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa terbentuk suatu relasi yang didasari dari kepercayaan masing-masing pihak yang menumbuhkan hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) terdapat adanya kepercayaan. Adapun wujud kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah kemudahan pinjaman berupa pinjaman tanpa adanya jaminan, hanya dengan fotocopy KTP.

#### **d. Manfaat Kepercayaan (*Trust*)**

Implikasi dari kepercayaan adalah mantapnya keyakinan dan kepercayaan diri di antara aktor-aktor dalam menjalin interaksi satu

sama lain setelah melalui intensitas interaksi yang akuntabel dan transparan (Dedi Darmawan, 2008: 431).

Kepercayaan (*trust*) menjadi salah satu faktor penting dalam membangun hubungan jangka panjang antar individu maupun antar organisasi. Suatu organisasi harus mampu mengenali faktor-faktor yang dapat membangun kepercayaan (*trust*) agar dapat menciptakan dan memelihara hubungan dengan orang lain ataupun organisasi lain.

Kepercayaan merupakan hal penting bagi kesuksesan relationship. Manfaat (*benefit relationship*) yang didasarkan pada kepercayaan adalah signifikan dan menggambarkan tentang *Cooperation*, komitmen, *relationship duration*, dan kualitas.

Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa adanya kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumiijawa mempunyai manfaat sebagai berikut: (1) Adanya kepercayaan memungkinkan terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam, (2) kepercayaan dalam program tersebut dapat menumbuhkan komitmen yang dapat dijaga dan dipertahankan dengan cara antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam harus saling memenuhi kewajiban masing-masing, (3) adanya kepercayaan dalam program tersebut akan terbentuk kerjasama yang dapat menentukan lamanya hubungan kerjasama yang terjalin antara

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam, (4) kepercayaan dalam program tersebut dapat meningkatkan kualitas program yang berpengaruh terhadap keberlangsungan program tersebut.

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti, yang kemudian dilakukan perbandingan terhadap teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa manfaat kepercayaan (*trust*) yang dikemukakan oleh para ahli sudah dirasakan manfaatnya dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa.

**e. Tindakan Membangun Kepercayaan (*Trust*)**

Perilaku nyata dari dua individu yang terlibat dalam suatu hubungan adalah penting untuk mengetahui apakah kepercayaan dapat dibangun dalam hubungan itu atau tidak. Sebuah kepercayaan dapat meningkatkan dan merangsang hubungan organisasi dan membimbing perilaku yang akan membantu dalam membangun kepercayaan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan atau usaha dalam membangun kepercayaan (*trust*). Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, menunjukkan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa juga memerlukan tindakan atau usaha dalam membangun kepercayaan (*trust*). Adapun tindakan-tindakan atau usaha yang dilakukan dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebagai berikut: (1) antara pengelola dan kelompok peminjam harus saling bersinergi dan saling

mematuhi hak dan kewajiban masing-masing antar pengelola dan kelompok peminjam, (2) Sikap terbuka akan memudahkan dalam menjalin kerjasama antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam, (3) Adanya harapan yang ingin dicapai mempengaruhi sikap pihak-pihak yang bekerjasama agar terjalin kerjasama yang baik dengan cara masing-masing mematuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan.

Frederique Six (2005: 82) menjelaskan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam membangun kepercayaan (*trust*). Tindakan dalam membangun kepercayaan (*trust*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Terbuka
- 2) Berbagi pengaruh
- 3) Melimpahkan wewenang
- 4) Mengelola harapan bersama

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti, yang kemudian dilakukan perbandingan terhadap teori yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa sesuai dengan tindakan dalam membangun kepercayaan (*trust*) yang dikemukakan oleh para ahli.

## 2. Faktor Pendukung Pembentuk Kepercayaan (*Trust*)

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sebagai salah satu program pemberdayaan diselenggarakan di masyarakat, juga menempatkan kepercayaan dalam menjalin dan menciptakan suatu hubungan. Namun, kepercayaan (*trust*) memang bukan suatu hal yang mudah dibangun. Membangun kepercayaan (*trust*) tidak bisa dibangun hanya dari salah satu sumber saja, tetapi harus dari dua atau lebih pihak.

Begitu juga dengan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang saling membangun kepercayaan (*trust*) dengan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Dalam membangun kepercayaan (*trust*) diantara pihak-pihak tersebut, terdapat faktor-faktor yang mendukung terbentuknya kepercayaan (*trust*). Faktor pendukung dan tersebut dapat timbul dari faktor internal maupun eksternal dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Menurut Mayer *et al.* dalam (Kirana Nadhifah, 2011: 11), faktor yang membentuk kepercayaan seseorang terhadap yang lain ada tiga yaitu kemampuan (*ability*), kebaikan hati (*benevolence*), dan integritas (*integrity*).

Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah dari faktor internal dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK), pengurus kelompok dan anggota kelompok dan eksternal dari desa dan

pihak bank. Faktor internal dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah adanya pelayanan yang baik dan pemberian informasi yang benar mengenai program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dari pengurus kelompok dengan administrasi kelompok yang baik serta tanggung jawab, dan dari anggota kelompok mayoritas anggota sudah disiplin dan tanggung jawab dalam menyetor pinjaman. Sedangkan faktor eksternal dari desa adalah desa memfasilitasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mensosialisasikan program dan membantu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengatasi kelompok yang bermasalah, serta dari pihak bank memberikan kemudahan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyimpan dan menarik dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti, yang kemudian dilakukan perbandingan terhadap teori yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa sesuai dengan faktor yang membentuk kepercayaan (*trust*) yang dikemukakan oleh para ahli.

### **3. Faktor Penghambat Pembentuk Kepercayaan (*Trust*)**

Membangun kepercayaan (*trust*) pada orang lain merupakan hal yang tidak mudah. Hal itu tergantung pada perilaku dan kemampuan kita agar orang lain dapat percaya pada kita dan juga berarti seseorang rela mengambil resiko dalam sebuah hubungan. Oleh karena itu, kepercayaan



(*trust*) menjadi salah satu faktor penting dalam membangun dan mengembangkan hubungan jangka panjang antar individu maupun antar organisasi.

Membangun kepercayaan (*trust*) tidak bisa dibangun hanya dari salah satu sumber saja, tetapi harus dari dua atau lebih pihak. Begitu pula membangun kepercayaan (*trust*) antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dengan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang mana pasti terdapat faktor-faktor yang menghambat dalam terbentuknya kepercayaan (*trust*) diantara pihak-pihak tersebut, baik faktor internal maupun faktor eksternal.

Data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan, menunjukkan bahwa faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini berasal dari faktor internal yaitu masih ada anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman yang disebabkan pendapatan yang tidak tentu dan rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta kurangnya pemahaman tentang administrasi. Sedangkan data hasil penelitian yang diperoleh peneliti di lapangan mengenai solusi dalam mengatasi hambatan membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban

masing-masing pihak, yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Melihat hasil penelitian yang diperoleh peneliti di atas, peneliti menyimpulkan bahwa faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini berasal dari faktor internal yaitu masih ada anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman yang disebabkan pendapatan yang tidak tentu dan rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta kurangnya pemahaman tentang administrasi. Sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepercayaan (*trust*) dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*trust*) pada program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dapat dikatakan terjalin dengan baik. Kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa mempunyai manfaat sebagai berikut: (a) Adanya kepercayaan memungkinkan terjadinya kerjasama yang saling menguntungkan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam, (b) kepercayaan dalam program tersebut dapat menumbuhkan komitmen yang dapat dijaga dan dipertahankan dengan cara antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam harus saling memenuhi kewajiban masing-masing, (c) adanya kepercayaan dalam program tersebut akan terbentuk kerjasama yang dapat menentukan lamanya hubungan kerjasama yang terjalin antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam, (d) kepercayaan dalam program tersebut dapat meningkatkan kualitas program yang berpengaruh terhadap keberlangsungan program tersebut.
2. Faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam pelaksanaan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini berasal dari

faktor internal dan eksternal. Faktor internal: (a) pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah adanya pelayanan yang baik dan pemberian informasi yang benar mengenai program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), (b) pengurus kelompok dengan administrasi kelompok yang baik serta tanggung jawab, (c) anggota kelompok mayoritas anggota sudah disiplin dan tanggung jawab dalam menyetor pinjaman. Sedangkan faktor eksternal: (a) desa memfasilitasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mensosialisasikan program dan membantu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengatasi kelompok yang bermasalah, (b) pihak bank memberikan kemudahan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyimpan dan menarik dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

3. Faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini berasal dari faktor internal yaitu masih ada anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman yang disebabkan pendapatan yang tidak tentu dan rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta kurangnya pemahaman tentang administrasi. Sedangkan solusi dalam mengatasi hambatan membangun kepercayaan (*trust*) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa, maka dapat diajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) perlu mengetahui lebih dalam mengenai pentingnya kepercayaan (*trust*) bagi kemajuan program pemberdayaan perempuan guna membangun hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan.
2. Keharmonisan hubungan yang telah terjalin selama ini dapat dijadikan sebagai modal untuk menerapkan dan mempertahankan kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan.
3. Kelompok peminjam ikut berperan dalam mempertahankan hubungan kerjasama yang dilandasi kepercayaan (*trust*) agar hubungan kerjasama dapat berlangsung secara berkesinambungan.

## Daftar Pustaka

- Arya Hadi Darmawan. (2002). *Kemiskinan Kepercayaan (The Poverty of Trust), Stok Modal Sosial dan Disintegrasi Sosial*, Makalah Seminar dan Kongres Nasional IV Ikatan Sosiologi Indonesia (ISI) bertemakan “Menggalang Masyarakat Indonesia Baru yang Berkemanusiaan”, Bogor 27-29 Agustus 2002.
- Burhan Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dedy Hermawan. (2008). *Trust dan Network Governance yang Transparan dan Akuntabel*. Malang:
- Dharma S. (2002). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang: UMM Press.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Depdiknas. (2009). *Rencana Strategis Pendidikan Nonformal dan Informal 2010-2014*. Jakarta: Ditjen PNFI Depdiknas.
- Djudju Sudjana. (2004). *Pendidikan Nonformal*. Bandung: Falah Production.
- Driyakara. (1980). *Driyakara Tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Dwi Rajibianto. (2010). *Pengaruh Modal Sosial untuk Penguatan Industri Kecil Genteng Soka di Desa Kebulusan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Dwi Siswoyo, dkk. (2012). *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Entoh Tohani. (2016). *Modal Sosial (Social Capital) dalam Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Farida Yusuf Tayibnapis. (2008). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Field, John. (2010). *Modal Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Fukuyama, Francis. (2010). *Trust, Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Yogyakarta: Qalam.
- Hasbullah J. (2006). *Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta: MR-United Press.

- Henry Simamora. (2004). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Imam Gunawan. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Isbandi Rukminto. (2002). *Pemikiran-Pemikiran dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ki Hadjar Dewantara. (1977). *Karya Ki hadjar Dewantara Bagian Pertama Pendidikan*. Yogyakarta: MLTS.
- Kirana Nadhifah. (2011). *Pengaruh Dimensi Trust terhadap Partisipasi Pelanggan E-Commerce Kabupaten Jember*. Jember: Universitas Jember.
- Lawang, M.Z. (2004). *Kapital Sosial dalam Perspektif Sosiologik Suatu Pengantar*. Jakarta: FISIP UI Press.
- Lexy J. Moleong. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Loekman Soetrisno. (1997). *Kemiskinan, Perempuan, dan Pemberdayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mosse, Julia Cleves. (2007). *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mustofa Kamil. (2012). *Model Pendidikan Dan Pelatihan: (Konsep Dan Aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2006). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nidia Desi Utami. (2014). *Modal Sosial pada Kelompok Tani/Ternak Tibona Desa Tibona Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumba*. Makassar: Universitas Hasanuddin. (Diakses di repository.unhas.ac.id pada tanggal 13 Desember 2015, pada pukul 17.20 WIB)
- Remiswal. (2013). *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rini Rinawati. (2010). *Pemberdayaan Perempuan dalam Tridaya Pembangunan Melalui Pendekatan Komunikasi Antar Pribadi*. (Diakses di prosiding.lppm.unisba.ac.id pada tanggal 18 Februari 2016, pada pukul 09.50 WIB)

- R. Rachmawati. (2014). *Peranan Modal Sosial dalam Pengelolaan BUM Desa (Studi di Desa Karang Rejek Kecamatan Wonosari dan Desa Bleberan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Saleh Marzuki. (2012). *Pendidikan Nonformal: Dimensi Dalam Keaksaraan Fungsional, Pelatihan, Dan Andragogi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Siti Irene Astuti Dwiningrum. (2014). *Modal Sosial dalam Pengembangan Pendidikan (Perspektif Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Six, Frederique. (2005). *The Trouble with Trust: The Dynamics of Interpersonal Trust Building*.
- Sugiyono. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Suprijanto. (2009). *Pendidikan Orang Dewasa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tatang Kusmayadi. (2007). *Relationship Quality dalam Dimensi Relationship Marketing* (Diakses di [www.stan.im.ac.id](http://www.stan.im.ac.id) pada tanggal 18 Desember 2015, pada pukul 07.29 WIB)
- Tim Koordinasi PNPM-PPK. (2011). *Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PNPM-PPK)*. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM-PPK.
- Tim Penyusun. (2012). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tahun 2010*. Bandung: Citra Umbara.
- Tim Penyusun. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal. (diakses di <http://kemdikbud.go.id> pada tanggal 3 Desember 2015, pada pukul 23.11 WIB).
- Versia Nabela Azizi. (2013). *Modal Sosial sebagai Strategi Kelangsungan Hidup Tukang Sampah di TPS Nologaten Sleman Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- <https://tegalkab.bps.go.id> (Diakses pada tanggal 3 Desember 2016, pada pukul 20.00 WIB).



<http://www.kajianpustaka.com/2016/05/pengertian-dan-manfaat-kepercayaan-trust.html> (Diakses pada tanggal 17 Mei 2016, pada pukul 09.10 WIB).

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Catatan Lapangan

### **CATATAN LAPANGAN I**

Hari Selasa, 17 Mei 2016, peneliti bertemu dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yaitu Nurfaridoh, Mutolaah dan 2 staf. Bertempat di Kantor UPK, peneliti dengan pengelola melakukan diskusi mengenai maksud peneliti melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Pertemuan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB dengan hasil bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lembaga tersebut tetapi harus bertemu dengan ketua UPK terlebih dahulu.

## **CATATAN LAPANGAN II**

Hari Senin, 23 Mei 2016 peneliti bertemu dengan Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Bertempat di rumah Ketua UPK Bumijawa, peneliti dengan Ketua UPK melakukan diskusi mengenai maksud peneliti melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Pertemuan tersebut dilaksanakan mulai pukul 16.00-17.30 WIB dengan hasil bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dan melakukan perjanjian bertemu kembali untuk melakukan wawancara.

### **CATATAN LAPANGAN III**

Hari Senin, 30 Mei 2016 peneliti bertemu dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa di kantor UPK. Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola UPK yakni Ketua UPK, Sekretaris UPK, dan Bendahara UPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.30 WIB. Peneliti melakukan wawancara mengenai UPK. Dari wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai organisasi dan fasilitas di UPK.

#### **CATATAN LAPANGAN IV**

Hari Senin, 6 Juni 2016 peneliti bertemu dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa di kantor UPK. Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola UPK yakni Ketua UPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.

## **CATATAN LAPANGAN V**

Hari Senin, 13 Juni 2016 peneliti bertemu dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa di kantor UPK. Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola UPK yakni Bendahara UPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan Ketua UPK yaitu mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.

## **CATATAN LAPANGAN VI**

Hari Senin, 20 Juni 2016 peneliti bertemu dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa di kantor UPK. Peneliti melakukan wawancara dengan pengelola UPK yakni Sekretaris UPK. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan Ketua UPK yaitu mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari wawancara terhadap narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.



## **CATATAN LAPANGAN VII**

Hari Senin, 13 Juni 2016 peneliti bertemu kembali dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa di kantor UPK. Peneliti bertemu dengan sekretaris UPK. Pertemuan dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.00. Peneliti melakukan dokumentasi terkait arsip-arsip yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian. Peneliti meminta data kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Peneliti memperoleh data dokumentasi mengenai arsip-arsip berupa profil lembaga, struktur organisasi, visi dan misi.

### **CATATAN LAPANGAN VIII**

Hari Senin, 20 Juni 2016 peneliti bertemu kembali dengan pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa di kantor UPK. Peneliti bertemu dengan sekretaris UPK. Pertemuan dilaksanakan mulai pukul 09.00 – 11.00. Peneliti melakukan dokumentasi terkait arsip-arsip yang dibutuhkan untuk memperkuat penelitian. Peneliti meminta data kelembagaan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa untuk melengkapi data yang diperoleh sebelumnya. Peneliti memperoleh data dokumentasi mengenai arsip-arsip berupa daftar anggota kelompok, daftar sarana dan prasarana serta peneliti meminta izin kepada pengelola untuk mengambil foto di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa. Selain itu peneliti juga melakukan diskusi dengan sekretaris UPK mengenai rekomendasi kelompok yang bisa dimintai data untuk penelitian.

## **CATATAN LAPANGAN IX**

Hari Kamis, 30 Juni 2016 peneliti bertemu dengan TY dan SU selaku salah satu pengurus kelompok, yaitu Bendahara dan Sekretaris kelompok Jamiyah Gunungagung. Bertempat di rumah beliau, peneliti menjelaskan maksud peneliti melakukan penelitian di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dan meminta data untuk penelitian. Pertemuan tersebut dilaksanakan mulai pukul 16.00-17.30 WIB dengan hasil beliau setuju untuk dimintai data dan melakukan perjanjian bertemu kembali untuk melakukan wawancara.

## **CATATAN LAPANGAN X**

Hari Sabtu, 2 Juli 2016 peneliti kembali bertemu dengan SU yang merupakan sekretaris kelompok Jamiyah Gunungagung. Bertempat di rumah beliau untuk melakukan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 13-00 – 15.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.

## **CATATAN LAPANGAN XI**

Hari Minggu, 3 Juli 2016 peneliti kembali bertemu dengan TY yang merupakan bendahara kelompok Jamiyah Gunungagung. Bertempat di rumah beliau untuk melakukan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09-00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.

## **CATATAN LAPANGAN XII**

Hari Minggu, 10 Juli 2016 peneliti bertemu dengan DR selaku anggota kelompok peminjam yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian untuk bertemu. Bertempat di rumah beliau, peneliti melakukan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09-00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.

### **CATATAN LAPANGAN XIII**

Hari Minggu, 17 Juli 2016 peneliti bertemu dengan EM selaku anggota kelompok peminjam yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian untuk bertemu. Bertempat di rumah beliau, peneliti melakukan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09-00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan DR yaitu mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.

#### **CATATAN LAPANGAN XIV**

Hari Minggu, 24 Juli 2016 peneliti bertemu dengan MI selaku anggota kelompok peminjam yang sebelumnya sudah melakukan perjanjian untuk bertemu. Bertempat di rumah beliau, peneliti melakukan wawancara. Kegiatan tersebut dilaksanakan mulai pukul 09-00 – 11.00 WIB. Peneliti melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama dengan DR dan EM yaitu mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP. Dari hasil wawancara dengan narasumber tersebut peneliti memperoleh data mengenai program SPP, dan kepercayaan dalam program SPP.



## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA**

Topik : Kepercayaan (*Trust*) dalam Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus pada Kelompok Al-Ikhlas di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)

*Key Informan* : Pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

#### **I. Identitas Diri**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan/ Jabatan :

#### **II. Pertanyaan Wawancara seputar Unit Pengelola Kegiatan (UPK)**

1. Kapan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini berdiri?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
3. Siapa pencetus gagasan/pendiri Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
4. Apa yang menjadi visi dan misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
5. Berapa jumlah personil/pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
6. Bagaimana struktur kepengurusan dalam Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
7. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

8. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
9. Adakah program yang menjadi unggulan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
10. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam melaksanakan programnya?
11. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
12. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
13. Siapa saja yang menjadi sasaran program Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
14. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
15. Bagaimana karakteristik sasaran program Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
16. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
17. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
18. Bagaimana kondisi sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
19. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

### **III. Pertanyaan Wawancara seputar Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)**

1. Kapan program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mulai diselenggarakan?
2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
3. Siapa pencetus gagasan program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
4. Apa yang menjadi tujuan program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
5. Berapa jumlah pengelola dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
6. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
7. Siapa saja yang menjadi sasaran program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
8. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

9. Bagaimanakah karakteristik sasaran Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
10. Adakah persyaratan untuk menjadi anggota kelompok dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
11. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
12. Adakah dampak positif dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
13. Adakah dampak negatif dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
14. Apa saja manfaat yang diperoleh dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
15. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
16. Menurut Bapak/ Ibu apa harapan dari adanya program Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

#### **IV. Pertanyaan Wawancara seputar Kepercayaan (*trust*)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah kepercayaan (*trust*) penting dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan?

2. Siapa saja yang terlibat dalam terbentuknya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
3. Apa saja usaha yang dilakukan dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
4. Bagaimana membangun kepercayaan (*trust*) antara pengurus dengan kelompok program pemberdayaan perempuan?
5. Apakah ada sikap terbuka dari masing-masing dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
6. Bagaimana pengaruh harapan bersama dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
7. Apa fungsi kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
8. Bagaimana bentuk relasi yang terjadi dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
9. Bagaimana wujud kepercayaan (*trust*) yang ada dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
10. Adakah pengaruh dengan adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
11. Bagaimana pengaruh kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan modal?

12. Bagaimana pengaruh kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan terhadap nama baik?
13. Adakah faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
14. Adakah faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
15. Apa saja kendala dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
16. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
17. Apa saja manfaat yang diperoleh dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
18. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap kerjasama dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

19. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap komitmen dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
20. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap lamanya hubungan yang terjalin dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
21. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap kualitas dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

Topik : Kepercayaan (*Trust*) dalam Program Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus pada Kelompok Al-Ikhlas di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal)

Key Informan : Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

### **I. Identitas Diri**

1. Nama :
2. Tempat/Tanggal Lahir :
3. Alamat :
4. Pendidikan Terakhir :
5. Pekerjaan/ Jabatan :

### **II. Pertanyaan Wawancara**

1. Sejak kapan Anda mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?
2. Bagaimana Anda bisa mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?
3. Apa alasan Anda mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP)?
4. Siapa saja yang menjadi sasaran program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
5. Apa saja persyaratan untuk menjadi anggota kelompok dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?



6. Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
7. Adakah dampak positif dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
8. Adakah dampak negatif dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
9. Bagaimana kondisi Anda sebelum dan setelah mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
10. Apa saja manfaat yang Anda peroleh dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
11. Apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
12. Apa harapan Anda dari adanya program Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
13. Menurut Anda apakah kepercayaan (*trust*) penting dalam penyelenggaraan program pemberdayaan perempuan?
14. Siapa saja yang terlibat dalam terbentuknya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

15. Apa saja usaha yang dilakukan dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
16. Bagaimana membangun kepercayaan (*trust*) antar anggota kelompok program pemberdayaan perempuan?
17. Apakah ada sikap terbuka dari masing-masing dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
18. Bagaimana pengaruh harapan bersama dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
19. Apa fungsi kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
20. Bagaimana bentuk relasi yang terjadi dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
21. Bagaimana wujud kepercayaan (*trust*) yang ada dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
22. Adakah pengaruh dengan adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan?
23. Bagaimana pengaruh kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan modal?
24. Bagaimana pengaruh kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan terhadap nama baik?

25. Adakah faktor pendukung dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
26. Adakah faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
27. Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
28. Apa saja manfaat yang diperoleh dari adanya kepercayaan (*trust*) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
29. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap kerjasama dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
30. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap komitmen dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?
31. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap lamanya hubungan yang terjalin dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

32. Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (*trust*) terhadap kualitas dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?

Lampiran 3. Pedoman Observasi

**PEDOMAN OBSERVASI**

<b>No.</b>	<b>Aspek</b>	<b>Deskriptif</b>
1	Keadaan fisik dan non fisik:  a. Struktur Organisasi  b. Sejarah  c. Visi dan Misi	
2	Fasilitas:  a. Sarana dan prasarana  b. Jenis dan jumlah  c. Kondisi	
3	Program Simpan Pinjam  Perempuan (SPP):  a. Latar belakang Program  b. Tujuan Program  c. Sasaran Program  d. Pelaksanaan	

## **PEDOMAN DOKUMENTASI**

### **1. Arsip Tertulis**

- 1) Profil lembaga
- 2) Daftar anggota kelompok
- 3) Struktur Organisasi
- 4) Data inventaris
- 5) Pembiayaan

### **2. Foto**

- 1) Kondisi fisik lembaga
- 2) Sarana dan prasarana
- 3) Pelaksanaan program

Lampiran 5. Hasil Observasi

No.	Aspek	Deskriptif
1	Keadaan fisik dan non fisik:	
	a. Struktur Organisasi	Pengelola di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berjumlah 5 orang. Struktur kepengurusan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa mencakup Ketua, sekretaris, bendahara dan 2 orang staff.
	b. Sejarah	Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang berkedudukan di tingkat kecamatan terbentuk pada Maret tahun 1999 melalui forum Musyawarah Antar Desa (MAD). Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa berasal dari adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mengadakan program-program dalam rangka pengembangan desa sehingga dituntut adanya lembaga yang mengelola keuangan. Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini dalam pelaksanaannya mempunyai dua program yang termasuk dalam program pemberdayaan, yaitu program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan program Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
	c. Visi dan Misi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa  “Menjadikan suatu lembaga kegiatan pemberdayaan masyarakat yang mandiri, berdaya guna dan dipercaya agar kemiskinan di masyarakat Kecamatan Bumijawa semakin berkurang”. Visi ini diwujudkan dengan melayani masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat tersebut.</li> <li>2. Misi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melestarikan dan mengembangkan hasil program pembangunan dengan sistem partisipatif diantaranya PPK-PNPM</li> <li>b. Melestarikan kelembagaan dan kegiatan dari program pemberdayaan partisipatif</li> </ol> </li> </ol>

		<p>diantaranya yang telah dilakukan PPK-PNPM</p> <p>c. Mengembangkan kapasitas kelembagaan masyarakat dan aparat pemerintah desa serta kecamatan dalam memfasilitasi sistem pembangunan partisipatif yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat</p> <p>d. Meningkatkan peran masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan pembangunan</p> <p>e. Mengembangkan jaringan kemitraan berdasarkan prinsip BKAD</p> <p>f. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi daerah yang berorientasi pada pemberdayaan perekonomian rakyat melalui penguatan keterkaitan sektoral, regional dan global.</p>
2	Fasilitas:	
	a. Sarana dan prasarana	Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah tanah dan gedung Kantor Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa yang digunakan untuk melayani anggota kelompok peminjam.
	b. Jenis dan jumlah	Meja kantor (4 buah), Meja komputer (3 buah), Kursi (15 buah), Lemari (5 buah), Komputer (3 unit), Kamera digital (1 unit), Kendaraan (1 unit), Kipas Angin (2 unit), Papan nama (1 buah), Papan kegiatan (1 buah)
	c. Kondisi	Baik dan layak pakai
3	Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP):	
	a. Latar belakang Program	Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan salah satu program yang dilaksanakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa dan merupakan salah satu program pemberdayaan perempuan dari pemerintah yang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO). Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) itu sendiri merupakan kegiatan permodalan untuk



		kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa ini diselenggarakan dari tahun 2005.
	b. Tujuan Program	<p>Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan mempunyai tujuan:</p> <p>a. Tujuan Umum</p> <p>Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam pedesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan RTM.</p> <p>b. Tujuan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mempercepat proses pemenuhan kebutuhan pendanaan usaha ataupun sosial dasar.</li> <li>2) Memberikan kesempatan kaum perempuan meningkatkan ekonomi rumah tangga melalui pendanaan peluang usaha.</li> <li>3) Mendorong penguatan kelembagaan simpan pinjam oleh kaum perempuan.</li> </ol>
	c. Sasaran Program	Sasaran program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah RTM yang produktif yang memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok simpan pinjam perempuan yang sudah ada di masyarakat.
	d. Pelaksanaan	Bentuk kegiatan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah memberikan dana pinjaman sebagai tambahan modal kerja bagi kelompok kaum perempuan yang mempunyai pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjaman.

Lampiran 6. Tabel Analisis Data

PERTANYAAN		REDUKSI DATA	DISPLAY DATA	KESIMPULAN
Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa				
Latar belakang program	Kapan program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mulai diselenggarakan?	<p>FS: Program SPP mulai diselenggarakan pada tahun 25.</p> <p>NF: kalau program SPP itu diselenggarakan sejak tahun 2005.</p> <p>MT: SPP itu ada sejak tahun 2005</p>	Mulai diselenggarakan pada tahun 2005.	Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mulai diselenggarakan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sejak tahun 2005.
	Apa yang mendasari diselenggarakannya program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: yang mendasari itu karena ketidakberdayaan masyarakat miskin ya, Mbak. Khususnya kaum perempuan. Tapi sebenarnya program SPP itu memang sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional. Karena program-program yang dijalankan di UPK itu sudah ada di PTO.</p> <p>NF: yang mendasari itu ya dasarnya sudah ditetapkan di PTO. Program-program yang dijalankan UPK itu memang sudah ada di PTO, termasuk program SPP itu sudah ada di PTO.</p>	<p>1. Ketidakberdayaan masyarakat miskin</p> <p>2. Sudah ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Operasional.</p>	Dasar diselenggarakannya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah Petunjuk Teknis Operasional yang didalamnya sudah ditetapkan program-

		MT: SPP itu kan dari pemerintah, dari situ ada PTO yang mendasari diselenggarakannya program-program di UPK.		programnya.
	Siapa pencetus gagasan program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: SPP itu ya berasal dari pemerintah melalui PPK Kecamatan.</p> <p>NF: SPP itu berarti ya dari pemerintah, Mbak. Karena SPP itu kan salah satu program di UPK, dan UPK berasal dari pemerintah.</p> <p>MT: program SPP dari pemerintah melalui PPK Kecamatan.</p>	berasal dari pemerintah melalui PPK Kecamatan.	Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) merupakan program yang berasal dari pemerintah melalui PPK Kecamatan.
Tujuan program	Apa yang menjadi tujuan program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat miskin, terutama bagi kaum perempuan.</p> <p>NF: SPP tujuannya itu supaya ada keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan simpan pinjam agar bisa sejahtera.</p> <p>MT: SPP bertujuan agar masyarakat kurang mampu, terutama perempuan menjadi lebih berdaya dan sejahtera.</p>	<p>1. Menyejahterakan masyarakat miskin perempuan</p> <p>2. Keterlibatan kaum perempuan</p>	Tujuan dari diselenggarakannya program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah agar ada keterlibatan kaum perempuan dalam rangka menyejahterakan hidupnya.
Struktur organisasi	Berapa jumlah pengelola dari	FS: jumlah pengelolanya ada 5, terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan 2 staff.	Jumlah pengelola ada 5, terdiri dari	Jumlah pengelola di Unit Pengelola

	Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>NF: saat ini jumlah pengelolanya ada 5, itu ada ketua, sekretaris, bendahara dan 2 staff.</p> <p>MT: pengelola di UPK Bumijawa ada 5, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan staffnya ada 2.</p>	ketua, sekretaris, bendahara dan 2 staff.	Kegiatan (UPK) ada 5 orang, yang terdiri dari ketua, sekeretaris, bendahara, dan 2 orang staff.
	Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: wilayah kecamatan Bumijawa ini sangat mendukung program SPP, karena beberapa desa di Kecamatan Bumijawa bisa dibilang berpotensi meningkatkan pendapatan dengan modal yang dipinjam dari program SPP.</p> <p>NF: desa di wilayah Kecamatan Bumijawa berpotensi sekali ya dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.</p> <p>MT: banyak wilayah di Kecamatan Bumijawa ini yang berpotensi dalam mendukung program SPP.</p>		Wilayah kecamatan Bumijawa mempunyai potensi dalam mendukung program SPP, karena beberapa desa di Kecamatan Bumijawa dapat berpotensi meningkatkan pendapatan dengan modal yang dipinjam dari program SPP.
Sasaran program	Siapa saja yang menjadi sasaran program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan	<p>FS: sasaran program SPP itu masyarakat miskin yang produktif, khususnya kaum perempuan.</p> <p>NF: sasaran SPP itu perempuan-perempuan RTM.</p>	Sasarannya masyarakat miskin yang produktif.	Sasaran dari program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah

	Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	MT: program SPP ya sasarannya untuk para perempuan, khususnya perempuan yang termasuk RTM		perempuan-perempuan RTM yang produktif.
	Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	FS: sampai saat ini jumlahnya hampir mencapai 200 kelompok.  NF: jumlahnya mungkin sekitar 190-200-an ya.  MT: kalau tidak salah jumlah sudah mencapai 200-an kelompok ya mungkin.	Jumlah kelompok mencapai 200 kelompok	Jumlah sasaran yang telah mengikuti Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) hampir mencapai 200 kelompok.
	Bagaimanakah karakteristik sasaran Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	FS: karakteristik sasarannya perempuan RTM yang produktif dan harus melalui kelompok perempuan yang ada di masyarakat dan kelompok tersebut sudah berjalan minimal satu tahun.  NF: karakteristik sasarannya terutama perempuan miskin yang aktif, maksudnya itu yang memiliki usaha atau kondisi bisa usaha, begitu Mbak. Dan juga ikut dalam kelompok perempuan yang sudah berjalan minimal satu tahun.  MT: karakteristik sasarannya yang pasti para perempuan, terutama yang termasuk dalam RTM dan produktif.	1. Perempuan RTM produktif. 2. Perempuan yang aktif, bisa usaha. 3. Termasuk dalam kelompok yang sudah berjalan minimal satu tahun.	Karakteristik sasaran dalam program Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah perempuan RTM yang produktif dan aktif serta mengikuti kelompok perempuan yang sudah berjalan minimal satu tahun.

Pelaksanaan program	Apa saja kegiatan yang dilakukan dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: kegiatannya itu perguliran dana. Ada juga kegiatan pembagian dana sosial dari surplus.</p> <p>NF: kegiatannya ya simpan pinjam, pembinaan pada saat perguliran.</p> <p>MT: kegiatannya itu ya simpan pinjam perguliran dana, Mbak.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Simpan pinjam</li> <li>2. Pembagian dana sosial</li> </ol>	Kegiatan yang dilakukan dalam Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) yaitu simpan pinjam dan pembagian dana sosial dari surplus pinjaman.
	Adakah dampak positif dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: dampak positifnya tentu ada, berdampak sekali pada kaum perempuan. perempuan-perempuan menjadi lebih berdaya dan sejahtera.</p> <p>NF: dampak positifnya pasti ada, dampaknya itu pemikiran perempuan jadi lebih mandiri. Kaum perempuan jadi lebih berdaya.</p> <p>MT: tentu saja ada, dampak positifnya ya perempuan-perempuan bisa memenuhi kebutuhannya, mempunyai modal usaha, bisa meningkatkan penghasilannya, ya bisa lebih sejahtera <i>lah</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lebih berdaya dan sejahtera.</li> <li>2. Pemikiran perempuan lebih mandiri.</li> <li>3. Dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan penghasilan.</li> </ol>	Dampak positif dengan adanya pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah kaum perempuan dapat memenuhi kebutuhan dan meningkatkan penghasilan serta pemikiran perempuan lebih

				mandiri sehingga kaum perempuan lebih berdaya dan lebih sejahtera
	Apa saja manfaat yang diperoleh dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: manfaatnya itu bisa membantu modal usaha dan juga mempermudah peminjaman dengan tidak adanya jaminan.</p> <p>NF: manfaatnya bisa membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama kaum perempuan dengan modal yang dipinjam dari UPK.</p> <p>MT: manfaatnya ya itu tadi dari SPP bisa memenuhi kebutuhan, punya modal usaha, penghasilannya bertambah.</p>	<p>1. Membantu modal usaha.</p> <p>2. Meningkatkan kesejahteraan perempuan</p> <p>3. Memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan.</p>	Manfaat yang diperoleh dari Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah dapat membantu modal usaha dari pinjaman tanpa jaminan, meningkatkan kesejahteraan kaum perempuan serta memenuhi kebutuhan dan menambah penghasilan.
	Apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit	<p>FS: kendalanya itu masih banyak masyarakat yang kurang paham tentang SPP di UPK.</p> <p>NF: kendalanya itu ya tunggakan pinjaman.</p> <p>MT: kalau di simpan pinjam ya yang jadi kendalanya paling setoran macet atau nunggak.</p>	<p>1. Kurang paham tentang SPP di UPK</p> <p>2. Tunggakan pinjaman</p>	Apa saja yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit

	Pengelola Kegiatan (UPK)			Pengelola Kegiatan (UPK)
	<b>Kepercayaan (Trust)</b>			
Tindakan membangun kepercayaan ( <i>trust</i> )	Siapa saja yang terlibat dalam terbentuknya kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	<p>FS: yang terlibat tentunya antara UPK dan kelompok peminjam atau kelompok SPP.</p> <p>NF: yang terlibat tentunya seluruh pemanfaat SPP dan juga UPK.</p> <p>TY: UPK selaku pemberi pinjaman dan kelompok peminjam.</p>	UPK dan kelompok SPP.	yang terlibat dalam terbentuknya kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)
	Apa saja usaha yang dilakukan dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan	<p>FS: ya dengan memberikan pelayanan terbaik pada kelompok peminjam.</p> <p>NF: kalau bentuk realisasi yang ada, di pinjaman SPP itu kan tidak ada jaminan. Jaminan cuma fotocopy KTP, yang secara nominal kan tidak berharga ya, Mbak. Karena tidak ada jaminan otomatis harus ada kepercayaan. Walaupun tidak ada jaminan UPK memperlakukan dengan baik, memberikan pelayanan yang baik untuk peminjam.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang baik</li> <li>2. Memberi pinjaman sesuai permintaan</li> <li>3. Memberi kemudahan bagi si peminjam</li> </ol>	Usaha yang dilakukan dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah dengan



	(UPK)?	TY: memberikan pinjaman kepada kelompok peminjam sesuai permintaan memberi kemudahan kepada kelompok peminjam dengan syarat yang mudah.		memberikan pelayanan yang baik dan memberikan kemudahan bagi peminjam serta memberikan pinjaman sesuai dengan permintaan kelompok peminjam.
	Bagaimana membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) antara pengurus dengan kelompok program pemberdayaan perempuan?	<p>FS: membangunnya ya dengan cara antara pengelola UPK dan kelompok peminjam harus saling bersinergi. Pengelola melayani dengan baik, sementara kelompok peminjam juga harus mempunyai tanggung jawab, tanggung jawabnya itu misalnya menyetor tepat waktu atau tanggalnya.</p> <p>NF: membangunnya UPK melayani dengan baik, dan peminjam juga harus mempunyai tanggung jawab, tanggung jawabnya dengan menyetor tepat waktu atau tanggalnya. Jadi kan saling percaya.</p> <p>TY: cara membangunnya itu yang pasti dari pelayanan yang baik dari UPK ya, Mbak. Kalau UPK melayani dengan baik kan anggota</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saling bersinergi</li> <li>2. Melayani dengan baik</li> <li>3. Mengembalikan pinjaman tepat waktu</li> <li>4. Mematuhi hak dan kewajiban</li> </ol>	<p>Cara membangun kepercayaan (<i>trust</i>) antara pengurus dengan kelompok program pemberdayaan perempuan adalah dengan antara pengelola UPK dan kelompok peminjam harus saling bersinergi dan saling mematuhi hak dan kewajiban masing-masing antara pengelola dan</p>

		kelompok juga enak ya, Mbak. Tapi anggota kelompok juga harus baik, maksudnya anggota juga harus setor tepat waktu, tidak menunggak, ya disiplin <i>gitu lah</i> , Mbak. Jadi ya ibaratnya harus saling membantu harus saling menjaga, harus saling mematuhi hak dan kewajiban masing-masing antara pengurus dan anggotanya.		kelompok peminjam. Adapun hal itu dilakukan dengan pengelola memberikan pelayanan yang baik dan kelompok peminjam bertanggungjawab mengembalikan pinjaman tepat waktu.
	Apakah ada sikap terbuka dari masing-masing dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan?	<p>FS: tentu saja harus saling terbuka. Keterbukaan sangat penting untuk membangun kepercayaan. Bagaimana kita mau bekerjasama kalau tidak saling terbuka, tentunya kepercayaan akan sulit terwujud.</p> <p>NF: iya ada pastinya. Saling terbuka juga penting ya Mbak. Disini kan kita bisa dibilang bekerjasama. Kalau bekerjasama tentunya harus ada keterbukaan dari masing-masing. Terbuka yang bagaimana, dari kita pengelola terbuka dalam memberikan informasi yang benar tentang SPP. Tentang aturan-aturan dalam SPP, hak dan kewajiban masing-masing. Kurang lebih seperti itu.</p>	<p>1. Terbuka dalam informasi mengenai SPP</p> <p>2. Terbuka mengenai informasi peminjam</p>	Sikap terbuka dalam membangun kepercayaan dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sangat penting karena memudahkan dalam menjalin kerjasama. Adapun sikap terbuka dari pengelola dengan memberikan informasi yang benar mengenai

		<p>TY: iya pasti ada. Memang harus saling terbuka ya. Kalau saling terbuka <i>kan</i> bisa saling percaya ya. Kita sebagai peminjam juga harus terbuka dalam memberikan informasi. Apalagi saya sebagai bendahara kelompok yang merekomendasikan peminjam. Saya harus terbuka mengenai informasi si peminjam. Supaya UPK bisa mempertimbangkan.</p>		<p>program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kelompok peminjam memberikan informasi yang benar mengenai anggota kelompok peminjam.</p>
	<p>Bagaimana pengaruh harapan bersama dalam membangun kepercayaan (<i>trust</i>) dalam program pemberdayaan perempuan?</p>	<p>FS: dalam program SPP tentu ada harapan yang ingin diwujudkan. Untuk mewujudkannya perlu adanya kepercayaan. Kepercayaan yang seperti apa? Pengelola dan si peminjam harus saling mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan. Ada hak dan kewajiban yang harus dipatuhi masing-masing.</p> <p>NF: SPP itu mempunyai tujuan agar masyarakat miskin terutama perempuan bisa lebih berdaya dan lebih sejahtera. Itu tujuan yang ingin dicapai. Harapannya ya agar tujuan itu bisa tercapai. Harapan bisa terwujud kalau kita saling percaya. Dengan saling percaya masing-masing bisa punya kesadaran untuk bekerjasama dengan baik.</p> <p>TY: kalau harapannya kami ikut SPP kan supaya lebih sejahtera hidupnya. Kami kan inginnya</p>	<p>Kerjasama yang baik</p>	<p>Adanya harapan yang ingin dicapai mempengaruhi sikap pihak-pihak yang bekerjasama agar terjalin kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik akan terwujud apabila masing-masing mematuhi hak dan kewajiban yang ditetapkan dengan begitu harapan bisa terwujud.</p>

		harapan itu bisa terwujud. Jadi ya harus saling percaya dengan saling mematuhi hak dan kewajibannya masing-masing.		
Fungsi kepercayaan ( <i>trust</i> )	Apa fungsi kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan?	<p>FS: fungsi kepercayaan dalam program ini ya sebagai landasan kita untuk menjalin hubungan kerjasama. Agar kerjasama terjalin dengan baik ya harus ada rasa saling percaya.</p> <p>NF: disini kan programnya simpan pinjam apalagi tidak ada jaminan, jadi tentunya perlu kepercayaan dari dua pihak. Kepercayaan ya sebagai dasar kita, pegangan kita dalam hubungan simpan pinjam. Bisa dikatakan kalau saling percaya ya bisa mengurangi konflik, karena kan kalau saling percaya masing-masing bisa saling menjaga hubungan.</p> <p>TY: adanya kepercayaan ya supaya hubungan antara pengurus UPK dengan peminjam terjalin dengan baik, apalagi ini kan simpan pinjam ya harus saling percaya, saling menjaga jadi kan kalau ada masalah bisa diselesaikan baik-baik. Ya damai <i>gitu lah</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dasar menjalin kerjasama</li> <li>2. Mengurangi konflik</li> <li>3. Menjaga kedamaian</li> </ol>	fungsi dari adanya kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah sebagai landasan atau dasar dalam menjalin hubungan kerjasama antara pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam, serta berfungsi dalam mengurangi konflik yang terjadi dalam program tersebut sehingga bisa tercipta kedamaian.
Bentuk relasi	Bagaimana bentuk relasi yang terjadi	FS: di program simpan pinjam bentuk relasinya itu terjalinnya kerjasama. Seperti di program	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama</li> <li>2. Komunikasi</li> </ol>	Bentuk relasi yang terjadi dari adanya

	dari adanya kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>apapun kan pasti ada kerjasama. Cuma beda kerjasama dalam hal apa <i>gitu kan</i>. Kalau di simpan pinjam itu ya kerjasamanya dalam hal simpan pinjam. UPK memberikan pinjaman dan masyarakat bisa meminjam di UPK.</p> <p>NF: bentuk relasi kalau dalam program simpan pinjam itu ya ada kerjasama. Di program simpan pinjam itu kan dalam prosesnya ada interaksi antara pengelola UPK dan si peminjam, <i>nah</i> dari situ ada rasa saling percaya sehingga terjadi kerjasama. Kerjasama di simpan pinjam antara UPK dengan si peminjam ya.</p> <p>TY: Bentuk relasi yang terjadi ya kerjasama antara UPK dan kelompok peminjam berupa kesepakatan simpan pinjam yang didalamnya itu sudah ada aturan simpan pinjam. Ada komunikasi juga, jadi sebelum perguliran itu ada verifikasi dari tim verifikasi UPK untuk mencocokkan data dan kenyataan di lapangan, ada pembinaan juga <i>kan</i>, disitu <i>kan</i> ada tanya jawab juga.</p>		kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah terbentuknya kerjasama dalam hal simpan pinjam antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam. Selain itu ada juga terjalin komunikasi mengenai kesepakatan simpan pinjam melalui tanya jawab antara pengelola dan kelompok peminjam pada saat verifikasi dan pembinaan.
Wujud kepercayaan ( <i>trust</i> )	Bagaimana wujud kepercayaan ( <i>trust</i> ) yang ada dalam	FS: wujudnya mungkin kalau pinjaman di SPP ini tidak ada jaminan. Tidak ada syarat khusus, Cuma fotocopy KTP.	1. Pinjaman tanpa jaminan 2. Syarat fotocopy	Wujud kepercayaan dalam program Simpan

	program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>NF: kalau wujudnya, dalam bentuk realisasinya di SPP ini bisa meminjam tanpa jaminan. Kalau mau pinjam syaratnya cuma fotocopy KTP. Bisa dibilang kalau fotocopy KTP secara nominal itu kan tidak berharga, Mbak. Ya itu mungkin salah satu wujud kepercayaannya ya.</p> <p>TY: Kelompok peminjam bisa meminjam tanpa jaminan, jadi hanya berdasarkan rekomendasi dari bendahara kelompok peminjam. Syarat pinjamannya hanya dengan fotocopy KTP.</p>	KTP	Pinjam Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa adalah kemudahan pinjaman berupa pinjaman tanpa adanya jaminan, hanya dengan fotocopy KTP
	Bagaimana pengaruh kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan terhadap peningkatan modal?	<p>FS: pengaruhnya setiap individu masyarakat melalui kelompok bisa meminjam tanpa jaminan, sehingga si peminjam juga bisa meningkatkan modal untuk usahanya dari pinjaman itu. Untuk UPK sendiri karena kepercayaan masyarakat mengikuti program ini bisa terus berjalan dan UPK juga bisa membagi dandans dari surplus.</p> <p>NF: tentu saja berpengaruh terhadap peningkatan modal, karena tidak ada jaminan dan suku bunga yang rendah, masyarakat bisa meminjam untuk menambah modal usaha dan programnya bisa berjalan lancar dan bahkan UPK bisa memberikan dandans ketika ada surplus.</p>	Meningkatkan modal usaha melalui pinjaman tanpa jaminan	Pengaruh kepercayaan ( <i>trust</i> ) peningkatan modal adalah peminjam bisa meningkatkan atau menambah modal dengan pinjaman tanpa jaminan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK).

		TY: berpengaruh pada anggota kelompok peminjam bisa meminjam hanya menggunakan fotocopy KTP sebagai jaminan.		
Faktor pendukung	Adakah faktor pendukung dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: faktor yang mendukung ya, kalau dari UPK dengan memberikan pelayanan yang bagus, memberikan informasi yang benar. Kalau dari peminjam dengan administrasi kelompoknya yang baik. Kalau baik kan artinya tanggung jawab, disiplin. Jadi dari pengelolanya ya bisa percaya kalau mau meminjam lagi. Faktor lainnya ya paling dari desa ada musrembang, UPK bisa memberikan sosialisasi dan informasi yang berkaitan dengan SPP atau PNPM.</p> <p>NF: iya ada. Jelasnya secara internal ya, Mbak. Kalau menurut saya, di sikap itu memang betul-betul mempengaruhi. Karena memang pendekatannya itu memang harus betul-betul hati-hati, misalnya kalau ada tunggakan tidak bisa secara frontal, itu tidak bisa. Kalau ada tunggakan, kalau terlalu menekan nanti malah tidak bayar setoran, karena tidak ada jaminan kan. Tapi kalau terlalu lembek juga disepelekan. Pendekatannya ya disesuaikan, Mbak. Biasanya juga melibatkan tokoh masyarakat sekitar, khususnya pak lurah untuk mengatasi kelompok yang bandel istilahnya. Ada keterlibatan dari</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan yang baik pemberian informasi yang benar dari UPK</li> <li>2. Pengurus kelompok dengan administrasi yang baik serta bertanggung jawab</li> <li>3. Anggota disiplin dalam menyetor</li> <li>4. Desa memfasilitasi sosialisasi program UPK</li> <li>5. Bank memberikan kemudahan dalam menyimpan dan menarik dana SPP</li> </ol>	Faktor pendukung dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah Faktor internal dari pengelola Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah adanya pelayanan yang baik dan pemberian informasi yang benar mengenai program Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dari pengurus kelompok dengan administrasi kelompok yang baik serta tanggung

		<p>masing-masing unsur.</p> <p>TY: kalau faktor pendukung memang yang paling terlihat itu dari internal, sikap. Kami peminjam merasakan pengelola memang melayani kami dengan baik, informasi yang diberikan juga benar, jujur. Saya juga pribadi kenal dengan pengelola memang baik. Kalau dari kami dengan setor tepat waktu, tidak melebihi tanggal maksimal. Selain itu mungkin dari administrasi kelompoknya, dari kelompok peminjam ada buku administrasi antara lain buku peminjaman, kartu pinjaman buku tamu, buku serah terima pinjaman, buku setoran buku daftar pengurus.</p> <p>MT: faktor yang mendukung kalo dari UPK ya pasti pada pelayanan karena kita kan melayani. Kalau yang lain bisa dari desa termasuk mendukung dengan pihak UPK bisa memberikan sosialisasi tentang SPP, selain itu juga kan ada bank yang memudahkan kita untuk menyimpan dan menarik dana SPP.</p>		<p>jawab, dan dari anggota kelompok mayoritas anggota sudah disiplin dan tanggung jawab dalam menyetor pinjaman.</p> <p>Sedangkan faktor eksternal dari desa adalah desa memfasilitasi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam mensosialisasikan program dan membantu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) mengatasi kelompok yang bermasalah, serta dari pihak bank memberikan kemudahan bagi Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dalam menyimpan dan menarik dana Simpan Pinjam</p>
--	--	--	--	--



				Perempuan (SPP).
Faktor penghambat	Adakah faktor penghambat dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>FS: kalau yang menghambat itu, masih banyak kelompok yang kurang memahami administrasi, jadinya sedikit menghambat dalam membangun rasa percayanya itu.</p> <p>NF: faktor yang menghambatnya itu sama secara internal dari sikap juga. Masyarakatnya yang bandel sering menyepelkan karena tidak ada jaminan kan, cuma fotocopy KTP. Buktinya ada kelompok yang dari awal meminjam masih menunggak sampai sekarang. Berarti itu kan salah satu karakter ya, karakter masyarakat yang tidak mempedulikan dan kurang tanggung jawab.</p> <p>TY: kalau faktor penghambatnya itu rata-rata kelompok peminjam mayoritas pendidikannya rendah, maka rasa tanggung jawabnya kurang. Mereka kurang memahami aturan peminjaman yang disampaikan pengelola UPK. kadang-kadang ada peminjam yang tidak tepat waktu membayar dengan alasan belum punya uang dan minta dibayari dulu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman</li> <li>2. Pendidikan rendah</li> </ol>	Faktor penghambat dalam membangun kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini berasal dari faktor internal yaitu masih ada anggota yang kurang disiplin dalam menyetor pinjaman yang disebabkan pendapatan yang tidak tentu dan rendahnya pendidikan juga menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai aturan peminjaman di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) serta kurangnya pemahaman

				tentang administrasi.
	<p>Bagaimana cara mengatasi faktor penghambat dalam membangun kepercayaan (<i>trust</i>) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?</p>	<p>FS: solusinya ya dengan saling memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing. Di pembinaan biasanya diingatkan lagi hak dan kewajiban.</p> <p>NF: mengatasinya ya dengan diingatkan. Biasanya kalau perguliran dana itu ada pembinaan. Di pembinaan itu nanti kembali dijelaskan hak dan kewajiban. Kalau di peminjam kan haknya memperoleh pinjaman dan kewajibannya setor tepat waktu, tidak telat. Sebaliknya dari UPK ya haknya menerima setoran tepat waktu, tidak nunggak. <i>Nah</i> kewajibannya memberikan pinjaman pada si peminjam, memberikan pelayanan yang baik.</p> <p>TY: jika ada peminjam tidak dapat setor di bulan itu, maka akan dibayarkan menggunakan uang kas sebesar setoran. Terus, setiap kali ada perguliran, ada pembinaan dari UPK dan pengurus kelompok tentang hak dan kewajiban peminjam. Haknya ya meminjam dan kewajibannya mengembalikan tepat waktu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memenuhi hak dan kewajiban</li> <li>2. Mengingatkan</li> <li>3. Mengganti dengan uang kas</li> </ol>	<p>Solusi dalam mengatasi hambatan membangun kepercayaan (<i>trust</i>) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah dengan saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pihak Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP).</p>
Manfaat kepercayaan	Apa saja manfaat yang diperoleh dari	FS: manfaat yang diperoleh dari adanya kepercayaannya ya kegiatan simpan pinjam jadi	1. Program simpan pinjam semakin	manfaat yang diperoleh dari

(trust)	adanya kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>semakin bagus dan kelompok bisa menambah modal dengan pinjaman dengan jasa lunak atau tanpa jaminan.</p> <p>NF: Jelasnya adanya kepercayaan membuat rasa kekeluargaannya itu lebih erat karena memang disini kan meminjamkan tanpa jaminan, tapi UPK tetap memperlakukan dengan baik, dan juga adanya rasa saling percaya itu menjadikan programnya berjalan lancar sampai sekarang.</p> <p>TY: manfaatnya ya programnya jadi berhasil mungkin ya, buktinya yang paling kelihatan ya programnya masih bisa berjalan sampai sekarang ya, Mbak. Jadinya kan dengan berjalannya program ini bisa membantu masyarakat miskin terutama buat perempuan, dan juga enakya itu kalo disini bisa pinjam tapi tidak ada jaminannya.</p>	<p>bagus</p> <p>2. Memudahkan pinjaman dengan jasa lunak atau tanpa jaminan</p> <p>3. Rasa kekeluargaan lebih erat</p> <p>4. Program SPP berhasil dan berjalan lancar</p>	adanya kepercayaan ( <i>trust</i> ) dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yaitu dengan adanya kepercayaan rasa kekeluargaan menjadi semakin erat. Selain itu, adanya kepercayaan bermanfaat bagi keberhasilan program di UPK Kecamatan Bumijawa yang dapat dilihat dari keberlangsungan program yang berjalan hingga saat ini.
	Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan ( <i>trust</i> ) terhadap kerjasama dalam program	FS: Manfaat kepercayaan terhadap kerjasama ya pastinya dengan adanya kepercayaan memungkinkan adanya kerjasama. Kerjasamanya ya dalam bentuk simpan pinjam itu. <i>Nah</i> dari kerjasama itu kan nantinya ada manfaat yang	Terjalin kerjasama yang saling menguntungkan	Adanya kepercayaan dalam program tersebut memungkinkan terjadinya

	pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?	<p>diperoleh. Kelompok peminjam bisa dapat pinjaman dan program di UPK bisa berlanjut.</p> <p>NF: Pastinya bermanfaat ya terhadap kerjasama. Kalau tidak percaya kan susah ya kalau mau kerjasama. Apalagi kan kita tidak kenal langsung orangnya. Tidak tahu orangnya seperti apa. Baik tidak, tanggungjawab tidak. Kalau tidak percaya ya sulit <i>gitu</i>. Apalagi ini simpan pinjam, tapi simpan pinjam disini kan tanpa jaminan ya Mbak, jadi ya bisa jadi alternatif untuk membantu memberikan pinjaman dengan jasa lunak. Ya istilahnya memudahkan, terutama untuk kaum perempuan.</p> <p>TY: Kalau manfaatnya terhadap kerjasama ya antara UPK dan peminjam dapat bekerjasama yang saling menguntungkan karena si peminjam bisa mendapatkan pinjaman dengan jasa lunak dan program UPK dapat berjalan terus dan semakin berkembang.</p>		<p>kerjasama yang saling menguntungkan, berupa peminjam yang bisa memperoleh pinjaman dari Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan dari kerjasama tersebut juga berpengaruh pada keberlangsungan dan berkembangnya program di Unit Pengelola Kegiatan (UPK).</p>
	Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan ( <i>trust</i> ) terhadap komitmen dalam program pemberdayaan	<p>FS: manfaatnya terhadap komitmen itu ya dari adanya kepercayaan bisa menumbuhkan komitmen masing-masing pihak, yaitu UPK dan kelompok peminjam. Komitmen masing-masing harus dijaga dengan cara UPK dan si peminjam saling memenuhi hak dan kewajibannya dalam</p>	Menumbuhkan komitmen	Kepercayaan dalam program tersebut dapat menumbuhkan komitmen yang dapat dijaga dan

	<p>perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?</p>	<p>simpan pinjam.</p> <p>NF: ya tentu ada manfaatnya terhadap komitmen ya, Mbak. Komitmen itu kan ada karena saling percaya. Komitmen yang bagaimana, komitmennya itu ya UPK dan kelompok peminjam saling memenuhi kewajiban masing-masing. UPK kewajibannya ya memberi pelayanan yang baik bagi si peminjam. <i>Nah</i> si peminjam kewajibannya ya tanggung jawab terhadap aturan yang sudah disepakati dalam simpan pinjam.</p> <p>TY: terhadap komitmen pasti ada manfaatnya. Komitmennya itu berupa kelompok peminjam memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan simpan pinjam dari UPK dan UPK juga memberikan pelayanan yang baik kepada kelompok peminjam. Dengan begitu kan saling menjaga komitmen masing-masing agar bisa saling percaya.</p>		<p>dipertahankan dengan cara antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan kelompok peminjam harus saling memenuhi kewajiban masing-masing.</p>
	<p>Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap lamanya hubungan dalam program</p>	<p>FS: iya terhadap lamanya hubungan juga. Kepercayaan juga kan menghasilkan kerjasama. Dari <i>situ kan</i> nanti bisa terjadi berapa lama kerjasama yang terjadi. Kalau saling percaya ya bisa saja kerjasama dalam waktu yang lama, atau nanti bisa kerjasama lagi di program simpan</p>	<p>Terbentuk kerjasama yang dapat menentukan lamanya hubungan.</p>	<p>Adanya kepercayaan dalam program tersebut dapat terbentuk kerjasama yang dapat menentukan</p>

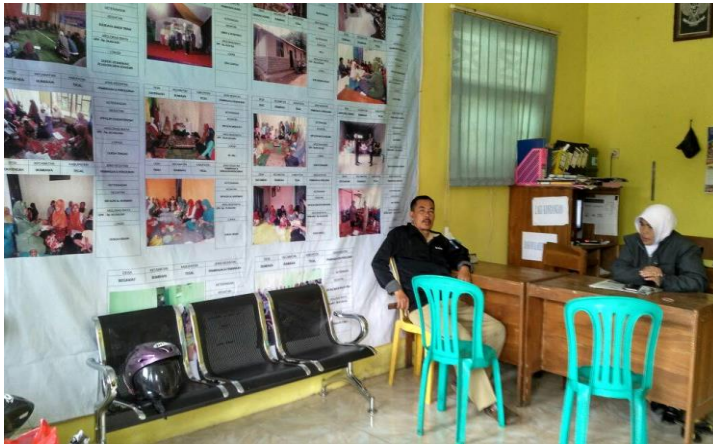
	<p>pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?</p>	<p>pinjam.</p> <p>NF: iya itu berarti menyangkut ke lamanya hubungan kerjasama juga ya? Kepercayaan itu memang pengaruh sekali ya ke lamanya hubungan kerjasama. Seperti yang tadi saya bilang kerjasama kalau tidak percaya kan susah, apalagi tidak kenal orangnya. Nah kalau sudah ada kerjasama kan nanti bisa dilihat ke depannya nanti kerjasamanya bisa berlanjut atau tidak, bisa berapa lama menjalin kerjasama.</p> <p>TY: kalau itu mungkin ini ya, UPK itu mempunyai program tiap semester untuk mengadakan sosialisasi program simpan pinjam dengan tujuan agar terjalin hubungan kerjasama untuk menumbuhkan kepercayaan kelompok peminjam terhadap UPK.</p>		<p>lamanya hubungan kerjasama yang terjalin antara Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan kelompok peminjam. Selain itu ada program sosialisasi yang dilakukan oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dengan tujuan agar terjalin kerjasama dan menumbuhkan kepercayaan kelompok peminjam kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK).</p>
	<p>Apa saja manfaat dari adanya kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap kualitas dalam program pemberdayaan perempuan melalui Program Simpan</p>	<p>FS: rasa saling percaya juga bisa meningkatkan kualitas program. Dengan pelayanan yang baik, UPK bisa dipercaya oleh masyarakat. Program UPK yang dipercaya juga meningkatkan kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus kan masyarakat bisa mengikuti program UPK yang bisa membantu masyarakat juga dan program UPK juga bisa terus berlanjut.</p>	<p>Meningkatkan kualitas program</p>	<p>Manfaat adanya kepercayaan (<i>trust</i>) terhadap kualitas dalam program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah dari adanya kepercayaan dalam</p>

	<p>Pinjam Perempuan (SPP) di Unit Pengelola Kegiatan (UPK)?</p>	<p>NF: begini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, program SPP itu kan bisa meminjam tanpa jaminan ya, Cuma fotocopy KTP. Jadi bisa dibilang mudah kalau meminjam di UPK. Tapi walaupun dari kami dari UPK tidak ada jaminan, kami tetap melayani si peminjam dengan baik. Programnya bisa berjalan sampai saat ini berarti kan karena dipercaya sebagai program yang bisa membantu masyarakat. Istilahnya programnya berhasil karena dipercaya begitu. Jadi, mungkin programnya berhasil karena kualitasnya.</p> <p>TY: Kelompok peminjam sudah merasakan manfaat dari program UPK. Walaupun di UPK bisa meminjam tanpa jaminan tapi jasa dan pelayanan yang diberikan pengelola UPK kepada peminjam itu sangat baik sehingga peminjam lebih memilih meminjam di UPK.</p>		<p>program tersebut dapat meningkatkan kualitas program yang berpengaruh terhadap keberlangsungan program tersebut.</p>
--	---	---	--	---

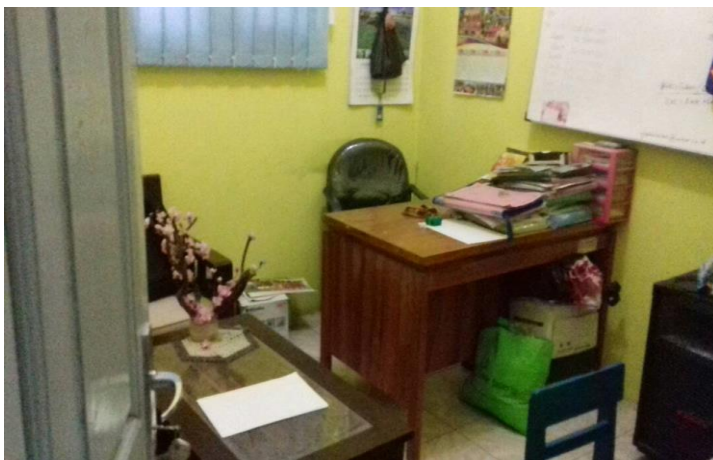
## Lampiran 7. Dokumentasi Foto



Gedung Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa tampak depan



Ruang tunggu Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa



Ruang Ketua Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa





Ruang pelayanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa



Proses pelayanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa




Proses pelayanan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Bumijawa



Perguliran dana Kelompok Al-Ikhlas

Lampiran 8. Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Pendidikan

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN**  
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telpun (0274) 540611 pesawat 405, Fax (0274) 5406611  
Laman: fip.uny.ac.id, E-mail: humas fip@uny.ac.id



---

Nomor : 2969/UN34.11/PL/2016 16 Mei 2016  
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal  
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yth. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Kesbanglinmas Prov. DIY  
Jl. Jenderal Sudirman 5  
Yogyakarta


Diberitahukan dengan hormat, bahwa untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik yang ditetapkan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, mahasiswa berikut ini diwajibkan melaksanakan penelitian:

Nama : Friska Zana Mustika  
NIM : 12102244025  
Prodi/Jurusan : PLS/PLS  
Alamat : Gunungagaung RT 01 RW 03 Bumijawa, Tegal

Sehubungan dengan hal itu, perkenankanlah kami memintakan izin mahasiswa tersebut melaksanakan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

Tujuan : Memperoleh data penelitian tugas akhir skripsi  
Lokasi : UPK Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal  
Subyek : Anggota kelompok SPP. Pengelola UPK  
Obyek : Kepercayaan (Trust) dalam program pemberdayaan perempuan  
Waktu : Mei-Juni 2016  
Judul : Kepercayaan (Trust) dalam Program Pemberdayaan Perempuan di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami mengucapkan terima kasih.

  
Dekan,  
Yogyakarta, M. Pd.  
NIP. 196009021987021001

Tembusan :  
1. Rektor (sebagai laporan)  
2. Wakil Dekan I FIP  
3. Ketua Jurusan PLS FIP  
4. Kabag TU  
5. Kasubbag Pendidikan FIP  
6. Mahasiswa yang bersangkutan  
Universitas Negeri Yogyakarta



## Lampiran 9. Surat Rekomendasi Penelitian dari Kesbangpol



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233  
Telepon: (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 17 Mei 2016

Nomor : 074/1620Kesbangpol/2016  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth  
Gubernur Jawa Tengah  
Up. Kepala Badan Penanaman Modal Daerah  
Provinsi Jawa Tengah

Di

SEMARANG

Memperhatikan surat :

Dari : Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Yogyakarta  
Nomor : 2969 /UN34.II / PL / 2016  
Tanggal : 16 Mei 2016  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul proposal **"KEPERCAYAAN ( TRUST ) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN ( UPK ) KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL "**, kepada:

Nama : FRISKA ZANA MUSTIKA  
NIM : 12102244025  
No. HP/Identitas : 085740047014 / 3328025406940004  
Prodi /Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah / Pendidikan Luar Sekolah  
Fakultas : Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Yogyakarta  
Lokasi Penelitian : Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah  
Waktu Penelitian : 19 Mei 2016 s.d 30 Juni 2016

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA  
BADAN KESBANGPOL DIY  
KABID. POLDA GRI DAN KEMASYARAKATAN

  
ARIS ARIYANTO.SH.MM  
NIP.196801281998031003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Diy (Sebagai Laporan).....
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas negeri Yogyakarta;
3. Yang Bersangkutan.

## Lampiran 10. Surat Rekomendasi Penelitian dari BPMD Jawa Tengah



### PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmnd@jatengprov.go.id http : //bpmnd.jatengprov.go.id  
Semarang - 50131

#### REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/2082/04.5/2016

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;  
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.
- Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor. 074/1620/Kesbangpol/2016 tanggal 17 Mei 2016 Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : FRISKA ZANA MUSTIKA
2. Alamat : Gunungagung RT 01 RW 03 Kelurahan Gunungagung, Kecamatan Bumijawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
3. Pekerjaan : Mahasiswa

Untuk : Melakukan Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Judul Proposal : KEPERCAYAAN (TRUST) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL
- b. Tempat / Lokasi : Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah
- c. Bidang Penelitian : Pendidikan
- d. Waktu Penelitian : 17-06-2016 s.d. 30-06-2016
- e. Penanggung Jawab : Dr. Entoh Tohani, M.Pd
- f. Status Penelitian : Baru
- g. Anggota Peneliti : -
- h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / Lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 17 Juni 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



SUNARWANTO DWIARTMOKO



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH**

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487  
Fax : (024) 3549560 E-mail : [bpmd@jatengprov.go.id](mailto:bpmd@jatengprov.go.id) <http://bpmd.jatengprov.go.id>  
Semarang - 50131

Semarang, 17 Juni 2016

Nomor : 070/6853/2016  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Tegal  
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol dan  
Linmas Kab. Tegal

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor 070/2082/04.5/2016 Tanggal 17 Juni 2016 atas nama FRISKA ZANA MUSTIKA dengan judul proposal KEPERCAYAAN (TRUST) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SUJARWANTO DWIATMOKO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP.19651204 199203 1 012

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. FRISKA ZANA MUSTIKA.